

PEMIKIRAN POLITIK PLATO DAN AL-FARABI DALAM MEWUJUDKAN NEGARA IDEAL

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Ushuluddin



Oleh :

NUR YULIATIN

NIM: EO.13.96.059

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN AQIDAH FILSAFAT
2001

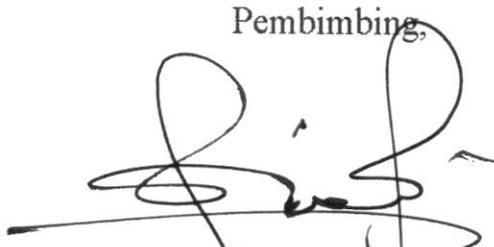
PERPUSTAKAAN	
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. REG : 19
	ASAL BUKU:
	TANGGAL :

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Nur Yuliatin ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqosah.

Surabaya, 22 Januari 2001

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Drs. Ma'shum, M.Ag
Nip. 150 240 835

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Nur Yuliatin ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

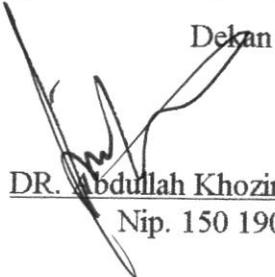
Surabaya 3 Pebruari 2001

Mengesahkan

Fakultas Ushuluddin

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel surabaya

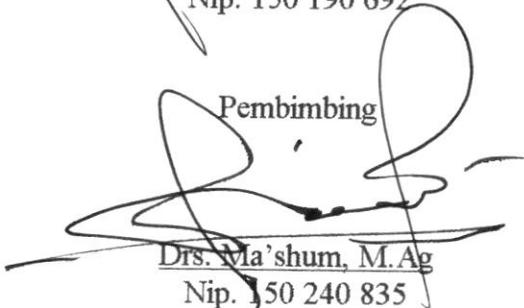
Dekan



DR. Abdullah Khozin Affandi, Ma

Nip. 150 190 692

Pembimbing



Drs. Ma'shum, M. Ag

Nip. 150 240 835

Sekretaris



Biyanto, M. Ag

Nip. 150 275 959

Penguji I



DRS. H. Muhammad Achyar

Nip. 150 186 637

Penguji II



DRS. H. Kasno, M. Ag

Nip. 150 224 884

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Alasan memilih judul	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Penjelasan Istilah	7
G. Kajian Pustaka	8
H. Metode Penelitian	10

BAB II : MENGENAL SOSOK PLATO DAN AL-FARABI 14

A. BIOGRAFI PLATO 14

1. Geneologi Plato 14

2. Pendidikan 17

3. Hasil karya 19

4. Latar Belakang 23

B. BIOGRAFI AL-FARABI 25

1. Geneologi Al-Farabi 25

2. Pendidikan 27

3. Hasil karya 29

4. Latar Belakang 30

BAB III : PEMIKIRAN POLITIK PLATO DAN AL-FARABI 32

A. Pengertian Politik 32

B. Pengertian Negara 35

C. Pemikiran Politik Plato 39

1. Tentang Negara Utama 39

2. Pembagian Masyarakat 42

3. Politik Kenegaraan 45

D. Pemikiran Politik Al-Farabi 48

1. Tentang Negara Utama 48

2. Pembagian Masyarakat	54
3. Politik Kenegaraan	58
BAB IV : ANALISA (Perbandingan Pemikiran Politik Plato dan Al-Farabi Dalam Mewujudkan Negara Ideal)	61
BAB V : PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran	69
C. Penutup	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Tahun-tahun terakhir ini semakin banyak orang menyadari bahwa politik merupakan hal yang melekat pada lingkungan hidup manusia. Politik hadir di mana-mana, di sekitar kita. Sadar atau tidak, mau atau tidak, politik ikut mempengaruhi kehidupan kita sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Hal itu berlangsung sejak kelahiran sampai dengan kematian, tidak peduli apakah kita ikut mempengaruhi proses politik atau tidak.¹

Politik sudah menjadi perhatian bagi semua orang, karena beberapa masalah. *Pertama*, negara mereka yang disebut *Polis* sering mengalami pertukaran-pertukaran sifat pemerintahan: dari monarki ke aristokrasi (*aristo* = pilihan, atas), dari aristokrasi ke tirani (perlakuan sewenang-wenang oleh seseorang), dan dari tirani ke demokrasi. Pertukaran-pertukaran yang sering terjadi ini menimbulkan perangsang bagi pemikiran-pemikiran politik. Maka pertukaran-pertukaran ini memberikan kepada mereka bahan-bahan penyelidikan dan perbandingan mengenai apa yang disebut negara. Dan oleh karena begitu banyak sifat pemerintahan itu yang dapat dikatakan merupakan tafsir tentang masalah negara dan masyarakat, maka mereka mendapat perangsang lebih lanjut untuk menjadikannya benar-benar sebagai suatu masalah: apakah sebenarnya negara dan masyarakat itu? Apa dan bagaimana hubungannya dengan individu? Bagaimanakah hubungan itu sebaiknya? Maka

¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 1.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
timbullah usaha pencarian ke arah yang ideal, maka timbullah cita-cita, selanjutnya teori dan falsafah bernegara dan bermasyarakat.

Sebab *kedua* yang menimbulkan perangsang bagi menjawab masalah-masalah politik adalah karena bicara, dan bukan kekerasan senjata, yang lebih diutamakan. Penjelasan suatu masalah diletakkan pada argumentasi, bukan pada pedang. Argumentasi menumbuhkan daya pikir dan rasa mengkeritik sehingga masing-masing pihak bersangkutan harus saling memperhatikan alasan yang dikemukakan.

Sebab *ketiga*, apa yang disebut negara mereka samakan dengan masyarakat, dan sebaliknya masyarakat identik dengan negara. Oleh sebab itu masalah pergaulan bersama adalah masalah negara, dan sebagai kelanjutannya masalah hidup sudah dengan sendirinya merupakan masalah negara.²

Sejak awal hingga perkembangan terakhir sekurang-kurangnya ada lima pandangan mengenai politik. Pertama, politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketiga, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Kelima, politik sebagai konflik dalam rangka mencari atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.³

Seiring dengan isu kebangkitan Islam (*The Revival of Islam*), maka berbagai persoalan yang berhubungan dengan hakekat, karakteristik, serta ruang lingkup suatu

² Delia Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, (Bandung : Mizam, 1997).

³ Ramlan Surbakti, *Memahami* , 2

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 negara Islam dan sistem politik Islam, mendapat sorotan tajam. Namun kajian politik Islam lebih banyak berbicara tentang peristiwa-peristiwa politik mutakhir di dunia Islam kontemporer, tanpa ada upaya untuk mengkaji secara lebih mendalam aspek-aspek teori politik yang benar-benar dapat mempengaruhi peristiwa tersebut.⁴

Di kalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. *Aliran pertama* berpendapat bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyamgkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Para penganut aliran ini pada umumnya berpendirian bahwa :

1. Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat.
2. Sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad dan oleh empat Al-Khulafa al-Rasyidin.

Aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya,

⁴ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam Dan Barat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), 1.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu negara.

Aliran ketiga menolak pendulant bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Maha Penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.⁵

Teori politik yang pertama timbul dalam sejarah Islam ialah mengenai jabatan kepala negara. Siapa yang berhak menjadi kepala negara sebagai pengganti Nabi dan bagaimana cara pengangkatannya. Itulah yang menimbulkan perbedaan faham di bidang politik dalam Islam.⁶

Ungkapan kata politik memang sukar untuk dirumuskan dalam beberapa kata saja, karena penggunaannya mempunyai arti yang panjang lebar disamping bermacam kemungkinan pemaknaannya. Menurut Wilbur White, penulis *White's Political Dictionary*. Ilmu politik adalah mempelajari asal mula bentuk-bentuk dan proses-proses negara dan pemerintahan.⁷

Masalah-masalah politik yang diungkapkan oleh beberapa filosof yaitu masalah bagaimana bentuk suatu negara yang ideal agar masyarakatnya dapat hidup dengan nyaman, yaitu adanya kerjasama yang baik antara rakyat dengan pemimpin negara. Studi komperatif ini mengangkat tentang pemikiran politik Plato dan al-Farabi

⁵ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta : UI-Press, 1993), 1-2.

⁶ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, (Jakarta : UI-Press, 1979), 101.

⁷ Iswara, F, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung : Bina Ilmu, 1980), 38. ✓

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dalam mewujudkan negara ideal. Keduanya merupakan figure pemikir filsafat dari Barat (Kristen) dan dari Timur (Islam), yang sama-sama mempunyai nama besar karena pengaruh pemikirannya. al-Farabi karena kebesaran namanya, dia dijuluki sebagai seorang Plato yang memakai baju Islam. Plato dan al-Farabi mempunyai kesamaan dalam perjalanan spiritualnya sebagai sesuatu yang mengagumkan hati dan bernilai. Bagaimana mereka menemukan dirinya berada dalam pemerintahan yang bergejolak dan telah berusaha untuk mencari system pemerintahan untuk mewujudkan suatu negara yang ideal.

B. Rumusan Masalah.

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat diketahui bahwa masalah yang ingin dikaji lebih lanjut adalah :

1. Bagaimana pemikiran politik Plato dan al-Farabi tentang negara ideal ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut ?

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Mengapa pemikiran kedua tokoh tersebut memiliki kesamaan ?

C. Alasan memilih Judul.

Penulis memilih judul Pemikiran Plato dan al-Farabi dalam mewujudkan negeri ideal karena ada beberapa alasan, antara lain :

1. Selama ini yang terlihat dalam kebanyakan penulisan ilmiah, hanya memaparkan suatu konsep seorang tokoh yang mempunyai pemikiran khas dari tokoh tersebut. Disini penulis mencoba mengangkat sebuah penelitian yang bernuansa komperatif. Adapun sisi menarik dari penulisan skripsi ini dapat dicermati dari kedua tokoh ini

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

karena terdapat adanya perbedaan agama dan keduanya hidup diwilayah yang berbeda, Plato dari Barat sedangkan al-Farabi dari Timur, namun keduanya mampu memberikan konsep yang hampir sama tentang politik.

2. Pemikiran politik pada zaman sebelum Plato sebagian besar hanya membahas masalah bentuk negara saja, sedangkan Plato tidak hanya membahas tentang bentuk negara tapi juga membahas tentang kepala negaranya. Pemikiran politik al-Farabi juga berbeda dengan pemikir Islam lainnya, perbedaannya itu adalah: jika pemikir lainnya, mendasarkan teorinya pada penerimaan terhadap sistem kekuasaan yang ada pada zaman mereka masing-masing. Lebih daripada itu, ada di antara mereka yang dalam menyajikan teorinya bertitik tolak pada pemberian legitimasi system pemerintahan yang ada. Atau mempertahankan status quo kepentingan penguasa, dan baru kemudian menawarkan saran-saran perbaikan dan reformasi.
3. Al-Farabi adalah filosof Islam pertama yang mengkaji masalah kenabian (*nabuwwan*) dan telah berhasil membuat teori pemaduan antara agama dengan falsafah, dan yang merupakan bagian terpenting dalam mazhabnya. Teori ini didasarkan atas pijakan kejiwaan dan metafisika serta mempunyai hubungan erat dengan politik dan akhlak.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

D. Kegunaan Penelitian.

Hasil penelitian terhadap “Studi komperatif tentang pemikiran politik Plato dan al-Farabi dalam mewujudkan negara ideal” ini diharapkan dapat menjadi :

1. Sumbangan untuk memperkaya tentang pemikiran filsafat politik baik dari Barat maupun Timur
2. Bahan pertimbangan dan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya bahwa pemikiran dari kedua tokoh (Plato dan Al-Farabi) ini ada perbedaannya, meskipun keduanya sama-sama menawarkan sebuah konsep untuk mewujudkan sebuah negara yang ideal.
3. Sebagai bahan pemikiran dan perenungan bahwa filsafat politik mempunyai peranan penting untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berarti dalam perjalanan hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan.

E. Tujuan Penelitian.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui lebih jauh pemikiran politik Plato dan al-farabi dalam mewujudkan negara ideal.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran dari kedua tokoh tersebut.
3. Untuk mengetahui sebab terjadinya persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut.

F. Penjelasan Istilah

Sebagai gambaran untuk memahami pembahasan, maka perlu sekali adanya suatu penegasan dan pembasan istilah dalam judul skripsi ini, sehingga penegasan dan pembatasan tersebut akan dapat diketahui dan dipahami secara jelas tentang arah dan tujuan serta menjangkau judul dari pada skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini adalah “PEMIKIRAN POLITIK PLATO DAN AL-FARABI DALAM MEWUJUDKAN NEGARA IDEAL”. Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman di dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya pengertian judul yang sesuai dengan penegasan istilah judul.

Pemikiran Politik : Peroses berfikir mengenai masalah ketatanegaraan atau Kenegaraan.⁸

Negara Ideal : Negara yang dicita-citakan, negara dalam organisasi teritorial suatu bangsa yang memiliki kedaulatan; yakni institut suatu bangsa yang berdiam dalam suatu daerah teritorial tertentu dengan fungsi menyelenggarakan kesejahteraan bersama, baik material maupun spiritual.⁹

Dari uraian penjelasan istilah di atas maka dapat dipahami yang ingin penulis jelaskan lebih lanjut tentang pemikiran politik Plato dan al-farabi dalam mewujudkan negara ideal adalah: pemikiran politik Plato dan al-Farabi yang berhubungan dengan negara ideal atau dapat dikatakan bahwa Plato ataupun al-farabi bukannya ingin membentuk suatu negara tetapi mereka menginginkan suatu negara yang ideal yang sesuai dengan pemikirannya atau angan-angannya.

G. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka, penulis disini mengkaji dua buku dan satu Skripsi yang menguraikan tentang pemikiran Plato dan al-Farabi.

⁸ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), 610.

⁹ Endang Saifudin Anshari, *Wawasan Islam Pokok-pokok Fikiran Tentang Islam Dan Umatnya*, (Jakarta : Raja Grafindo persada, 1993), 155.

Buku Islam Dan Tata Negara, yang ditulis oleh H. Munawir Sjadzali, M.A.

menguraikan tentang : Pemikiran al-Farabi tentang Negara, pemikiran al-Farabi tersebut, adalah : *Asal Mula Tumbuhnya Kota atau Negara*, dalam hal ini al-Farabi sependapat dengan Plato, Aristoteles dan juga Ibnu Abi Rabi', yang berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial. *Pengaruh Iklim atas Watak dan Perilaku Manusia*, al-Farabi berpendapat bahwa manusia tidak sama satu sama lain, disebabkan oleh banyak faktor. *Masyarakat-masyarakat yang Sempurna*, Menurut al-Farabi, terdapat tiga macam masyarakat yang sempurna: masyarakat sempurna besar, masyarakat sempurna sedang, masyarakat sempurna kecil. Di samping itu al-Farabi juga berpendapat adanya masyarakat-masyarakat yang tidak sempurna. *Negara yang utama*, Menurut al-Farabi terdapat bermacam-macam negara. *Pimpinan Negara*, al-Farabi berpendapat bahwa tidak semua warga negara mampu dan dapat menjadi kepala negara.

Buku Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam Dan Barat, di tulis oleh Drs.

Muhammad Azhar, MA. Dalam buku ini dijelaskan juga pemikiran Plato dan al-Farabi

tentang politik dan negara. Pemikiran itu antara lain : pemikiran Plato adalah : guna mewujudkan negara ideal, Plato membagi struktur sosial sebuah negara menjadi tiga bagian,. Sedangkan pemikiran politik al-Farabi dalam buku ini banyak menekankan pada hubungan negara dan pemerintahan.

Skripsi yang di tulis oleh Fitria Utami tahun 96 dengan judul Filsafat al-farabi Diantara Pemikiran Plato dan Aristoteles. Dalam skripsi ini dijelaskan semua pemikiran dari Al-farabi dan kemudian pemikiran al-Farabi tersebut dibandingkan dengan filsafat Plato dan Aristoteles.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari uraian diatas maka dapat dilihat bahwa belum ada buku ataupun skripsi yang membahas tentang perbandingan pemikiran politik Plato dan al-Farabi dalam mewujudkan negara ideal, walaupun dalam buku Islam dan Tata Negara yang di tulis oleh H. Munawir Sdjali, M.A. menerangkan tentang pemikiran politik al-Farabi, tetapi dalam buku itu tidak diurakai tentang perbedaan dan persamaan pemikiran politik Plato dan al-Farabi. Begitu juga dalam buku Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam dan Barat, dalam buku ini dijelaskan tentang pemikiran politik Plato dan al-Farabi, tetapi juga tidak dijelaskan tentang persamaan dan perbedaannya. Sedangkan dalam skripsi yang di tulis oleh Fitria Utami menjelaskan semua pemikiran al-Farabi dan membandingkan antara pemikiran Plato dan Aristoteles. Sedangkan judul yang diambil oleh penulis lebih spesifik lagi yaitu tentang pemikiran politiknya al-Farabi dan pemikiran politik al-Farabi tersebut dibandingkan dengan pemikiran politik Plato dalam mewujudkan negara ideal.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data dalam penulisan sebuah skripsi, maka dibutuhkan sumber-sumber yang dapat dipergunakan untuk penulisan suatu pembahasan. Karena sifat dari pengkajian ini bersifat literer, maka sumber yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah menggunakan bahan-bahan perpustakaan (library reseach) yaitu penelitian atau kajian di bidang kepustakaan dengan menggunakan buku-buku (literature) yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sumber data baik primer maupun sekunder diperoleh melalui riset keputusa-

kaan. Sumber data primer berhubungan langsung dengan tulisan-tulisan al-Farabi maupun Plato tentang politik. Sumber primer dalam penulisan skripsi ini adalah :

- Al-Farabi, Abu Nashr, *Ara'u Ahli'l-Madinah al-Fadhilah*, Kairo.
- J.H. Rapar. Th.D. ph. D, *Filsafat Politik Plato*, penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

Sedang sumber data sekunder dimaksudkan adalah buku-buku, artikel-artikel tentang politik yang ditulis oleh pengarang lain yang masih relevan dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dikembangkan secara tidak langsung. Sumber sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah :

- Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Penerbit Mizan, Bandung.
- Iswara, F, *Pengaruh Ilmu Politik*, Bina Ilmu, Bandung.
- Muhammad AL Bahiy, *Alam Pikiran Islam dan Perkembangannya*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, UI Press, Bandung.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dan literature-literatur lain sebagai penunjang penulisan skripsi ini.

2. Metode pengumpulan Data

Ketika mengumpulkan data dalam penelitian ini dipakai metode deskriptip dan selektip. Deskriptip dimaksud adalah upaya untuk mengungkapkan data sebagaimana adanya, tanpa ditafsirkan terlebih dahulu. Sedangkan selektip maksudnya adalah bahwa data yang terkumpul diseleksi, disaring dan kemudian dipilah-pilahkan dengan kriteria adanya relevansi dengan permasalahan.¹⁰ Artinya, jika suatu data benar-benar relevan dengan permasalahan maka akan diambil, dan sebaliknya suatu data akan diabaikan karena tidak relevan.

¹⁰ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), 48.

dan sistematisa pembahasan dalam seluruh rangkaian proses dalam penelitian ini.
penelitian. Dalam metode ini dijelaskan tentang sumber data, teknik pengumpulan data
belakang masalah; rumusan masalah; tujuan dan kegunaan penelitian serta metode
Bab pertama, merupakan pendahuluan berisi penjelasan tentang latar
bab, sebagai berikut :

Sistematisa pembahasan dalam laporan penelitian ini dibagi menjadi lima
4. Sistematisa Pembahasan

yang berbeda agama dan wilayah.
Digunakan untuk membandingkan pemikiran Plato dengan pemikiran al-Farabi
c. Metode Komparasi

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam hal ini adalah Plato dan al-Farabi yang mempunyai pemikiran tentang politik
Digunakan untuk mengetahui dan menguraikan latar belakang pemikiran.
b. Metode Kesinambungan

nuansa yang dimaksud.
dengan permasalahan diatas, sehingga dapat menangkap makna yang terkandung dan
Digunakan untuk menyelami dan memahami karya-karya yang berhubungan
a. Metode Interpretasi

berikut :
Adapun dalam teknik analisa data, penulis menggunakan metode sebagai
3. Metode Analisa Data

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bab kedua, dalam bab kedua ini penulis mencoba memperkenalkan sosok

Plato dan al-Farabi itu sendiri, dengan menguraikan tentang riwayat hidup Plato dan al-Farabi, pendidikan Plato dan al-farabi serta hasil karya Plato dan al-Farabi. Dan tidak kalah pentingnya dalam bab ini ditulis tentang latar belakang Plato dan al-Farabi sehingga keduanya mempunyai pemikiran untuk mewujudkan sebuah negara ideal.

Bab ketiga, dalam bab ketiga ini penulis mencoba menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran filsafat politik Plato dan al-Farabi. Pemikiran-pemikiran politik tersebut meliputi tentang pandangan-pandangan Plato dan al-Farabi tentang negara ideal serta politik kenegaraan Plato dan al-Farabi.

Bab keempat, dalam bab keempat ini penulis menganalisis tentang perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan antara pemikiran Plato dan al-Farabi tentang filsafat politik, karena keduanya sama-sama ingin mewujudkan bentuk suatu negara yang ideal.

Bab kelima, dalam bab kelima ini merupakan bab penutup, dan bab penutup ini mengemukakan tentang kesimpulan dari uraian isi skripsi dari bab kesatu sampai bab keempat. Dan pada bab penutup ini termuat juga saran-saran penulis tentang negara ideal dan tentang politik kenegaraan yang pada akhirnya membawa masyarakat hidup dalam kebahagiaan, tanpa rasa takut tidak adanya keadilan serta adanya kesewenang-wenangan pemimpin-pemimpin negara.

BAB II

MENGENAL SOSOK PLATO DAN AL-FARABI

Dalam usaha untuk membahas sejarah hidup tokoh, perlu diketahui tentang latar belakangnya. Adapun latar belakang tersebut meliputi : geneologi, pendidikan, hasil karya, dan pemikirannya. Dalam bab akan dipaparkan tentang hal yang berhubungan dengan biografi Plato dan biografi al-Farabi.

A. BIOGRAFI PLATO

1. Geneologi Plato

Tempat dan tahun kelahiran Plato yang sesungguhnya tidak diketahui dengan pasti. Ada yang mengatakan Plato lahir di Athena, ada juga yang mengatakan ia lahir di pulau Aegina. Demikian juga dengan tahun kelahirannya, ada yang mengatakan ia lahir 428 SM, ada juga yang mengatakan ia lahir 427 SM. Yang pasti ialah, Plato lahir dalam suatu keluarga aristocrat Athena yang turun-temurun memiliki peranan yang amat penting dalam kehidupan politik di Athena. Ayahnya bernama Ariston, seorang bangsawan keturunan raja Kodrus, raja terakhir Athena yang hidup sekitar 1068 SM yang sangat dikagumi rakyatnya oleh karena kecakapan dan kebijaksanaannya memerintah Athena. Ibunya bernama Periktione keturunan Solon.¹

Ketika Plato masih kecil, ayahnya meninggal. Ibunya kemudian menikah kembali dengan paman Plato yang bernama Pyrilampes. Paman yang menjadi ayah tiri Plato itu adalah seorang tokoh yang disegani di Athena karena ia

¹ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), 41.

adalah seorang politikus yang dekat dengan Pericles, pemimpin dan negarawan besar Athena yang baru saja meninggal (427 SM). Plato dibesarkan dan dididik oleh Pyrilampes.²

Plato meninggal di Athena pada tahun 347 dalam usia 80 tahun. Plato tidak pernah kawin dan tidak punya anak. Kemenakannya Speusippos menggantikannya mengurus Akademia.³

Nama Plato yang sebenarnya adalah Aristokles, Karena dahi dan bahunya yang amat lebar, ia memperoleh julukan "Plato" dari seorang pelatih senamnya. Plato dalam bahasa Yunani berasal dari kata benda "platos" (lebar) yang dibentuk dari kata sifat "platus" yang berarti "lebar". Dengan demikian, nama "Plato" berarti "si Lebar". Julukan yang diberikan oleh pelatih senamnya itu begitu cepat populer dan menjadi panggilannya sehari-hari, bahkan kemudian menjadi nama resmi yang diabadikannya lewat seluruh karyanya.⁴

Plato pernah dituduh berbahaya bagi kerajaan, maka ia ditangkap dan dijual sebagai budak. Nasib baik bagi Plato, dipasar budak ia dikenai oleh seorang bekas muridnya, Annikeris dan ditebusnya. Kemudian peristiwa ini diketahui oleh sahabat-sahabat dan pengikut-pengikut Plato di Athena. Mereka bersama-sama mengumpulkan uang untuk menggati harya penebus yang dibayar oleh Annikeris. Tetapi dia menolak penggantian uang tebusan itu dengan kata-kata : "Bukan tuan-tuan saja yang mempunyai hak untuk memelihara seorang Plato." Akhirnya uang ang terkumpul itu dipergunakan untuk membeli sebidang tanah yang diserahkan kepada Plato untuk dijadikan lingkungan sekolah tempat ia

² J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato* 42.

³ Muhammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani* (Jakarta : Penerbit UI-Perss, 1986), 91.

⁴ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato* 41.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 mengajarkan filosofinya. Di situ didirikan rumah sekolah dan pondok-pondok yang sekitarnya dihiasi dengan kebun yang indah. Tempat itu diberi nama “Akademia.” Di situlah Plato, sejak berumur 40 tahun. Sampai meninggalnya, dalam usia 80 tahun, mengajarkan filosofinya dan mengarang tulisan-tulisan yang kesohor sepanjang masa.⁵

Seorang filosof menulis tentang dia sebagai berikut : “Plato pandai berbuat. Ia dapat belajar seperti Solon dan mengajar seperti Socrates. Ia pandai mendidik pemuda yang ingin belajar dan dapat memikat hati dan perhatian sahabat-sahabat pada dirinya. Murid-muridnya begitu sayang padanya seperti ia sayang kepada mereka. Bagi mereka dia itu adalah sahabat, guru dan penuntun”⁶

Tatkala seorang muridnya merayakan perkawinannya, Plato yang sudah berumur 80 tahun datang juga pada malam perjamuan itu. Ia turut riang dan gembira. Setelah agak larut malam, ia mengundurkan diri, pada suatu sudut yang sepi di dalam rumahnya itu. Di sana ia tertidur dan tidur untuk selamanya dengan tidak bangkit lagi. Esok harinya seluruh Athena mengantarkannya ke kubur.

Tentang tahun-tahun terakhir hidup Plato kita tidak mempunyai informasi yang dapat dipercaya. Kita hanya tahu bahwa Plato mengepalai Akademia sampai kematiannya pada tahun 347. pada saat meninggalnya karangan Plato yang bernama *Nomoi* belum selesai dan seorang muridnya mempersiapkan manuskrip definitive supaya dapat beredar. Oleh sebab itu, Cicero mengatakan, “Plato scribens est mortuus” (Plato meninggal sedang menulis).⁸

⁵ Muhammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani* 89-90.

⁶ *Ibid*, 91.

⁷ *Ibid*, 92.

⁸ K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, (Yogyakarta : Kanisius, 1999), 120.

2. Pendidikan

Pelajaran yang diperoleh Plato dimasa kecilnya, selain dari pelajaran umum, ialah menggambar dan melukis, disambung dengan belajar musik dan puisi. Sebelum dewasa ia sudah pandai membuat karangan yang bersajak.⁹

Plato belajar filsafat dari Socrates, Pythagoras, Heracleitos, dan Elia, akan tetapi ajaran yang paling besar pengaruhnya adalah dari nama Ariston dan ibunya. Sebagi orang yang dilahirkan dalam lingkungan keluarga bangsawan ia mendapatkan pendidikan yang lebih baik dari seorang bangsawan, bernama Pyrilampes,¹⁰

Sebagaimana biasanya dengan anak orang baik-baik di masa itu, Plato mendapatkan pendidikannya dari guru-guru filosofi. Pelajaran filsafat mula-mula diperolehnya dari Kratylos. Kratylos dahulunya murid Herakleitos yang yang mengajarkan “semuanya berlalu” seperti air. Rupanya ajaran semacam itu tidak hinggap di dalam kalbu anak aristocrat yang terpengaruh oleh tradisi keluarganya.

Sejak berumur 20 tahun Plato mengikuti pelajaran Socrates. Pelajaran itulah yang memberi kepuasan baginya. Pengaruh Socrates makin hari makin mendalam padanya. Ia menjadi murid Socrates yang setia. Sampai pada akhir hidupnya Socrates tetap menjadi pujaannya.¹¹

Plato mempunyai kedudukan yang istimewa sebagai seorang filosof ia pandai menyatukan puisi dan ilmu, seni dan filosofi. Pandangannya yang dalam dan abstrak sekalipun dapat dilukiskannya dengan gaya bahasa yang

⁹ Muhammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, 87.

¹⁰ Asnoro Achmadi, *Filsafat Umum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), 48.

¹¹ Muhammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani* 88.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 indah tidak ada seorang filosof sebelum dan sesudahnya dapat menandinginya
 dalam hal ini.¹²

Plato tidak membatasi perhatiannya pada persoalan-persoalan etis saja, seperti yang dilakukan Socrates, melainkan ia mencurahkan minatnya kepada suatu lapangan luas sekali yang mencakup seluruh ilmu pengetahuan. Mata pelajaran yang utama diindahkannya adalah matematika dan ilmu pasti.¹³

Tak lama sesudah Socrates meninggal, Plato pergi dari Athena. Itulah permulaan ia mengembara, dua belas tahun lamanya, dari tahun 399 SM – 387 SM. Mula-mula ia pergi ke Megara, tempat Euklides mengajarkan filosofinya. Berapa lama ia di sana, tidak diketahui betul. Ada cerita yang mengatakan, bahwa ia di situ mengarang beberapa dialog, yang mengenai berbagai macam pengertian dalam masalah hidup, berdasarkan ajaran Socrates.

Dari Megara ia pergi ke Kyrena, di mana ia memperdalam pengetahuannya tentang matematika pada seorang guru, guru ilmu itu bernama Theodoros. Di sana ia juga mengajarkan filosofi dan mengarang buku-buku.¹⁴

Dengan demikian pendidikan yang diterima oleh Plato tidak secara formal saja, akan tetapi juga melalui pengembaraan dari satu negara ke negara lain, dan dari beberapa guru serta pengalaman yang di dapatnya selama ia melakukan perjalanan, guna menambah ilmu pengetahuannya, baik dalam bidang filsafat maupun dalam bidang umum.

¹² Muhammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, 88.

¹³ K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, 118.

¹⁴ Muhammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani* 89.

3. Hasil Karyanya

Karya-karya Plato sebenarnya sukar di pahami karena tidak tersusun secara sistematis seperti lazimnya sebuah karya ilmiah, di samping itu metode yang digunakannya berbentuk tanya jawab. Akan tetapi secara global pemikiran Plato dapat dibagi pada empat bagian penting yaitu :

1. Apologie, Kriton, Ion, Protagoras, Laches, Politeia Buku I, Lysis, Carmides dan Euthyphron. Buku buku ini berisikan tentang pembentukan pengertian dalam daerah etik.
2. Gorgias, Kratylos, Menon, Hippias. Dalam buku-buku tersebut kebanyakan membicarakan mengenai pertentangan politik dan pandangan hidup.
3. Phaidros, Symposion, Phaidon dan Politeia Buku II-X. buku-buku ini berisikan tentang idea pokok teori pengetahuan, metafisika, fisika, psikologi, etika, politik dan estetika. Dalam buku Phaidros banyak berdasarkan tentang pandangan agama, ia menggambarkan sifat dan nasib jiwa manusia. Dan intisari filosofinya Plato dalam Phaidros itu adalah tentang cinta.
4. Theaitetos, Parmenides, Sophistos, Politikos, Philibos, Timaios, Kritias dan Nomoi. Dalam buku-buku ini lebih mengedepankan tentang logika. Perhatian kepada keadaan yang lahir dan kejadian dalam sejarah. Dalam Timaios berisikan tentang teologi tentang lahirnya dunia dan pemerintahan dunia.¹⁵

¹⁵ Muhammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani* 93-94.

Sebagian besar karyanya ditulis dalam bentuk dialog dengan bahasa yang indah dan menawan hati. Plato bukan saja terkenal sebagai filsuf yang agung melainkan juga seorang sastrawan yang mengagumkan.¹⁶

Semua karya yang ditulis Plato merupakan dialog-dialog. Pertanyaan muncul, apa sebab Plato menggemari dialog sebagai bentuk sastra dan bukan risalah atau uraian sistematis lain yang lazim dipergunakan dalam dunia ilmiah. Hal ini ada dua alasan yang dapat menjelaskan pertanyaan ini. *Pertama*, Plato memilih dialog sebagai bentuk sastra, justru karena Socrates memainkan peranan sentral dalam pemikirannya. *Kedua*, Plato memilih dialog sebagai bentuk sastra, karena ia yakin bahwa filsafat menurut intinya tidak lain daripada suatu dialog. Berfilsafat berarti mencari kebijaksanaan atau kebenaran, dan dapat dimengerti bahwa “mencari kebenaran” itu sebaiknya dilakukan bersama-sama dalam suatu dialog.¹⁷

Sebenarnya tulisan atau karya-karya yang diwariskannya masih banyak sekali dan lengkap, akan tetapi kesukarannya di sini ialah untuk membedakan antara hasil karyanya yang asli dan yang tidak asli yang dikatakan sebagai tulisannya.¹⁸

Tidak semua karya yang disebut sebagai berasal dari Plato boleh dianggap otentik. Kita mempunyai suatu daftar yang berasal dari tahu-tahun sekitar awal tarikh Masehi dan disusun oleh dua sarjana Alexandria, yaitu Thrasylos dan Derkylides. Daftar ini menyebut 36 karya Plato (surat-surat dihitung sebagai satu karya) yang terbagi atas 9 “tetralogies” (grup yang

¹⁶ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, 44.

¹⁷ K Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani* 125-126.

¹⁸ Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Silsifat Barat I*, (Yogyakarta : Kanisius, 1991), 19.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 meliputi empat karya). Kini kebanyakan ahli sepakat dalam mengatakan bahwa dari 36 karya itu enam dialog berikut ini tidak dapat dianggap otentik : *Alkibiades II, Hipparkhos, Erastai, Theages, Klitophan, Minos*. Otentitas enam karya lain lagi dipersoalkan: *Alkibiades I, Ion, Menexenos, Hippias Maior, Epinomis, Surat-surat*.¹⁹

Semua tulisan Plato sukar untuk ditentukan waktu dikarangnya. Semuanya ditulisnya dalam masa lebih dari setengah abad. Tetapi bagaimana urutan terbitnya? Sungguhpun kebanyakannya berdasar atas idea, cita-cita, yang tertinggi, idea kebaikan, pokok pendirian dalam dialog-dialog itu tidak serupa semuanya. Ia mungkin berlain-lain menurut masalah dan waktu. Ada ahli yang memahamkan perbedaan-perbedaan itu sebagai kemajuan dalam pikiran Plato. Kemajuan pikiran itu tidak mengherankan, melihat lamanya ia mengasah pikirannya dengan filosofi.

Ada dua pendapat yang terkemuka tentang cara memahamkan buah tangan Plato yang sebanyak itu. Yang pertama cara metodik yang dikemukakan oleh FR. Schleiermacher dalam kata pendahuluan bukunya, yang berisikan terjemahan dialog-dialog Plato kedalam bahasa Jerman (1804-1810 dan 1828). Yang kedua cara genetik, mengikuti perkembangan, yang dikemukakan oleh Carl Friedrich Hermann dalam bukunya tentang sejarah dan sistem filosofi Plato, terbit pada tahun 1839.²⁰

Schleiermacher mengatakan, bahwa ketegasan kata Plato tidak dapat diketahui dari tulisannya saja. Bagian yang terbesar dari pendapatnya

¹⁹ K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, 120.

²⁰ Muhammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani* 92.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 dikemukakannya waktu mengajarkan filosofinya. Suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah ialah bahwa ajaran yang dibentangkannya kepada pembacanya sudah dipahaminya benar-benar. Jadi cara ia mengajarkan itu berdasar atas suatu rencana metodik. Mula-mula disiapkannya pembacanya dengan pengetahuan yang elementer. Kemudian diajaknya pembacanya memikirkan hal-hal itu seterusnya dengan jalan dialektik, sampai akhirnya pikirannya matang tentang masalah itu. Hermann tidak begitu pendapatnya. Ia mengatakan, bahwa dari tulisan-tulisan Plato dapat diikuti perkembangan pikirannya sendiri. Ia bermula dengan yang kecil dan maju sampai pada yang besar.

Tetapi betapa juga berbeda pendirian tentang menangkap buah pikiran Plato, tentang menentukan urutan tulisan dialognya ada persamaan pendapat. Segala yang ditulisnya itu dapat ditempatkan dalam empat masa. Tiap-tiap masa mempunyai karakteristik sendiri.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Pertama, karangan-karangan yang ditulisnya dalam masa mudanya yaitu waktu Socrates masih hidup sampai tak lama sesudah ia meninggal. Buku-bukunya yang diduga ditulis dalam masa itu ialah Apologie, Kriton, Ion, Protagoras, Laches, Politeia Buku I, Lysis, Charmides dan Euthyphron. Dalam seluruh dialog itu Plato tetap berpegang pada pendirian gurunya Socrates. Cita-cita yang sangat dikemukakannya dalam segala tulisannya di masa itu ialah pembentukan pengertian dalam daerah etik.

Kedua, buah tangan yang ditulisnya dalam masa yang terkenal sebagai masa peralihan. Masa disebut juga masa Megara, yaitu waktu Plato

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 tinggal sementara di situ. Dialog-dialog yang di duga ditulisnya dalam masa itu ialah Gorgias, Kratylos, Menon, Hippias dan beberapa lainnya. Persoalan yang diperbincangkan disitu kebanyakan mengenai pertentangan politik dan pandangan hidup, yang dikemukakannya dengan kata-kata yang bagus tetapi bersemangat. Dalam masa peralihan itu sudah terbayang perkembangan pikiran Plato keluar garis Socrates.

Ketiga, buah tangan yang disiapkannya di masa matangnya. Tulisannya yang terkenal dari waktu itu dan kesohor sepanjang masa ialah Phaidros, Symposion, Phaidon dan Politeia Buku II-X. ajaran idea menjadi pokok pikiran Plato dan menjadi dasar bagi teori pengetahuan, metafisika, fisika, psikologi, etik, politik dan estetika.

Keempat, buah tangan yang ditulisnya pada hari tuanya. Dialog-dialog yang dikarangnya di masa itu sering disebut Theaitetos, Parmenides, Sophistos, Politikos, Philibos, Timaios, Kritias dan Nomoi. Ada suatu perubahan yang nyata dalam uraiannya pada masa itu. Idea, yang biasanya meliputi seluruhnya, terletak sedikit kebelakang. Kedudukan logika lebih terkemuka. Di dalam dialog Timaios menunjukn bahwa Plato bukan saja seorang filosofi yang menguasai seluruh filosofi Grik sebelumnya, tetapi mempelajari juga berbagai ilmu spesial yang diketahui pada masanya. Dalam pikirannya semuanya itu tersusun kearah satu tujuan.²¹

4. Latar Belakang pemikiran Plato

²¹ Muhammad Hatta, *Alam Pikiran yunan* 94-95.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Plato lahir ketika puncak kejayaan pemerintahan demokrasi Athena

yang berada di bawah pimpinan Pericles baru saja berlalu. Ia dilahirkan dan tumbuh dewasa pada saat perang Peloponesos sedang berkobar. Ia menyaksikan kekalahan Athena dalam perang Peloponesos itu pada 404 SM. Bagi Plato, kekalahan Athena itu merupakan akibat dari ketidakmampuan sistem pemerintahan demokrasi untuk memenuhi kebutuhan rakyat di bidang politik, moral dan spritual. Itulah yang menyebabkan Plato begitu kritis terhadap demokrasi. Kekalahan Athena telah merangsang semangat Plato untuk menempuh karir politik.²²

Pemulihan pemerintahan demokrasi itu telah membawa harapan baru bagi seluruh rakyat Athena, termasuk Plato dan gurunya, Socrates. Harapan baru itulah yang mendorong Plato untuk berusaha memperoleh kesempatan menempuh karir di bidang politik, namun harapan itu segera kandas kembali ketika Socrates ditangkap dan dihukum mati oleh pemerintah demokrasi dengan tuduhan: Socrates adalah seorang penjahat, yang merusak kaum muda dan tak percaya kepada dewa-dewa yang diimani oleh negara, malahan sebaliknya percaya kepada soal-soal kerohanian yang baru. Kematian Socrates begitu mempengaruhi Plato sehingga seolah-olah ia kehilangan segalanya. Demikian pula ambisinya untuk menempuh karir politik lenyap sama sekali. Ia lalu mengambil kesimpulan bahwa sistem pemerintahan yang ada pada masa itu sangat buruk dan moralitas para penguasa sangat bobrok. Pemerintahan suatu negara akan menjadi baik dan mendatangkan kebahagiaan bagi manusia hanyalah apabila kekuasaan dalam negara diserahkan kepada para filsuf.

²² J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*,..... 42.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Hanya filsuf yang paling tepat menjadi raja atau raja harus menguasai filsafat, barulah suatu pemerintahan akan berhasil membebaskan rakyatnya dari segala bentuk kesengsaraan dan duka nestapa.²³

B. BIOGRAFI AL-FARABI

1. Geneologi al-Farabi

Nama lengkap al-Farabi adalah Abu Nashr Muhammad Ibn Muhammad Ibn Tharkham Ibn Auzalaq, digelari dengan nama "al-Farabi". Sedangkan di Eropa ia lebih dikenal dengan nama "Avennaser". Nama al-Farabi sebenarnya diambil dari kota Farab, tempat ia dilahirkan di desa Wasij dalam kota Farab, sekarang dikenal dengan kota Atrar yang terletak di wilayah Khurasan, Turki pada tahun 257 H (870 M).²⁴ Al-Farabi wafat pada bulan Rajab 339 H bertepatan dengan bulan Desember 950 M. di Aleppo dalam usia lanjut 80 tahun. Di akhir hayatnya al-Farabi lebih banyak hidup dalam uzlah, ~~digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id~~ ²⁵ ~~zuhud dan senantiasa berfikir secara filsafat.~~

Ayahnya keturunan Persia kawin dengan seorang wanita Turki. Dari itu, al-Farabi terkadang dikatakan sebagai keturunan Persia dan terkadang dikatakan sebagai keturunan Turki.²⁶

Pada tahun 330 H (945 M), ia pindah ke Damaskus, dan berkenalan dengan Saif al-Daulah al-Hamdani, Sultan Dinasti Hamdan di Aleppo. Sultan memberinya kedudukan sebagai seorang ulama istana dengan tunjangan yang

²³ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*..... 43-44.

²⁴ A. Mustofa, *Filsafat Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1997), 125.

²⁵ Yunasril Ali, *Perkembangan Pemikiran Salsafi Dalam Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), 41.

²⁶ Ahmad Daudy, *Kuliah Filsafat Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1986), 25.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 besar, tetapi al-Farabi lebih memilih hidup sederhana (Zuhud) Dan tidak tertarik dengan kemewahan dan kekayaan. Ia hanya memerlukan empat dirham saja sehari untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.²⁷

Di istana Saif al-Daulah ia mendapat kedudukan yang mulia sebagai seorang filosof. Kemudian ia hidup berpindah-pindah di beberapa kota di Syam, dan pada akhirnya menetap di Damaskus, di pinggir kota dalam sebuah kebun yang rindang di dekat sebuah kolam yang jernih.²⁸

Di sana ia mengembangkan ilmu pengetahuannya dengan para sastrawan, ahli bahasa, para penyair dan ilmuwan lainnya, yang menjadikan ia seorang filosof yang terkenal pada masanya di istana itu dan membawa kemajuan pemerintahan Saif al-Daulah. Di sana pulalah ia lebih banyak mendapat ilmu untuk menulis buku-buku filsafat dan di sanalah ia menghabiskan usianya.²⁹

Al-farabi dikenal sebagai silusuf Islam terbesar, yang memiliki keahlian dalam banyak bidang keilmuan dan memandang filsafat secara utuh dan menyeluruh serta mengupasnya dengan sempurna, sehingga filusuf yang datang sesudahnya, seperti Ibn Sina dan Ibn Rusyd banyak mengambil dan mengupas sistem silsifatnya.³⁰

2. Pendidikan

²⁷ Hasymsyah Nasutioan, *Filsafat Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999), 33

²⁸ Yunasril Ali, *Perkembangan Pemikiran Falsafi Dalam Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), 41.

²⁹ Ahmad syadali, Mudzakir, *Filsafat Umum*, (Bandung : Pustaka Setia, 1997), 168.

³⁰ Hasyimsyah Nasution, *Filsafat Islam*, 33

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sejak kecil al-Farabi tekun dan rajin belajar. Dalam berolah kata dan

tutur bahasa ia mempunyai kecakapan yang luar biasa. Penguasaan bahasa Iran, Turkistan dan Kurdistan sangat ia pahami, justru bahasa Yunani dan Surjani sebagai bahasa ilmu pengetahuan pada waktu itu al-Farabi belum bisa menguasai.

Pendidikan dasarnya ialah keagamaan dan bahasa, ia juga mempelajari Hadist, Feqih serta al-Qur'an, sedangkan bahasa yang dipelajarinya bermacam-macam antara lain : bahasa Arab, bahasa Turki dan bahasa Persia.

Sejak kecil ia gemar merantau dari sebuah negara Islam ke negara Islam lainnya. Mula-mula ia belajar di Khurasan yang merupakan tempat kelahirannya, ia memperoleh ilmu pengetahuan antara lain : filsafat dan matematika, ia tidak banyak memperhatikan ilmu kedokteran.³¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ketika ia tertarik dengan rasional, ia tidak puas dengan apa yang diperolehnya di kota kelahirannya, terdorong dengan keinginan intelektualnya

itu, maka ia meninggalkan rumahnya dan mengembara menuntut ilmu pengetahuan. Ia menuju Baghdad yang merupakan kota ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta pusat pemerintahan pada waktu itu, abad ke-4 H/ke-10 M.³²

Nampaknya pada waktu pertama datang di Baghdad, hanya sedikit saja bahasa Arab yang dikuasainya, ia sendiri mengatakan bahwa ia belajar ilmu nahwu tata bahasa Arab pada Abu Bakar al-Saraj, sebagai imbalan

³¹ M. Syarif, *Para Filosof Muslim*, (Bandung : PT Mizam, 1994), 56.

³² Harun Nasution, *Filsafat Dan Mistisme Dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1999), 26.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 pelajaran logika yang diberikan oleh al-Farabi kepadanya, dan ia betul-betul memanfaatkan untuk menimba ilmu pengetahuan.³³

Di Baghdad (Darus-Salam) ia berhubungan dengan Abu Basyr Matta bin Yunus seorang ahli semantik terkemuka. Dua puluh tahun al-Farabi tinggal di Baghdad, belajar ilmu semantik pada abu Basyr Matta bin Yunus lebih mahir dari gurunya. Besar sekali kemungkinannya karena kemampuannya itulah dia disebut “Guru Kedua” atau mungkin karena ia orang pertama yang memasukkan ilmu semantik dalam kebudayaan Arab. Sama halnya dengan Aristoteles yang disebut “Guru Pertama” karena ia orang pertama yang menciptakan ilmu semantik.³⁴

Sesudah dari Baghdad al-Farabi pindah ke Harran, pusat kebudayaan Yunani di Asia kecil, dan berguru kepada Yuhana Ibn Jilad. Tetapi tidak berapa lama, ia kembali ke Baghdad untuk memperdalam filsafat. Di Baghdad ini ia menulis dan membuat ulasan terhadap buku-buku filsafat Yunani dan mengajar. Dintara muridnya yang terkenal adalah Yahya Ibn ‘Adi, filsuf Kristen.³⁵

Dengan demikian pendidikan yang telah diterima al-Farabi tidak saja secara formal, melainkan dari pengembaraannya dari satu negara ke negara Islam lainnya, dan dari beberapa guru, serta pengalaman yang di dapatnya selama ia melakukan perjalanan guna menambah ilmu pengetahuannya.

3. Hasil Karya

³³ Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), 81.

³⁴ Ahmad Fuad al-Ahwani, *Filsafat Islam*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997), 74.

³⁵ Hasyimasyah, *Filsafat Islam* 32.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Kejeniusan al-Farabi dalam berbagai lapangan ilmu pengetahuan

tidak dapat dipetik secara lengkap, karena buku-bukunya yang ia tinggalkan sudah banyak yang hilang. Diantara karangan-karangan yang sekarang masih ada dan masih lestari antara lain :

1. *Maqalatun fi ma'anil-aql*. Berisi tentang kedudukan akal, pembagiannya dan sumber ilmu (makrifat).
2. *Al-Jami'baina Rakil-Hakiman*. Di antara kandungannya ialah mempertemukan pendapat dua orang filosof Yunani antara Plato dan Aristoteles.
3. *Fima Yanbaghi an-yuqaddima qabla ta'allumi falsafah*. Dalam buku ini ia mengemukakan bahwa logika tidak termasuk filsafat, tetapi sebagai alat untuk mempelajarinya.
4. *Al-Ibanah an-ghardhi Aristo fi kitabi ma ba'dat tabi'ah*. Penjelasan tujuan metafisika Aristoteles terutama tentang hakikat wujud ditinjau dari materi dan bentuk.
5. *Al-Masa-ilul-falsafah wal ajwibatu anha*. Kelanjutan penjelasan dari buku ke empat di atas, untuk sampai menetapkan Tuhan sebagai pencipta alam ini.
6. *Fushul-hikam*. Membahas tentang qidam dan hadisnya alam, kedudukan Malaikat langit dan bumi.
7. *Ara'u ahlil-madinah al-fadhilah*. Suatu teori tentang politik kekotaan (negara utama), dimana warga negaranya makmur dan bahagia.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

8. *Ihsha al-ulum wat-ta'rif bi aghrodhiha*. Menjelaskan tentang pembagian dan macam-macam ilmu.³⁶

Inilah sebagian karya dari al-Farabi, dan masih banyak lagi karya-karya al-Farabi yang lainnya.

Dalam upaya untuk menyebar luaskan pemikiran-pemikiran al-Farabi, maka kitab-kitabnya banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Inggris, Jerman, Arab dan bahasa Prancis.

4. Latar Belakang pemikiran al-Ffarabi

Al-Farabi hidup pada zaman kekuasaan Abbasyiah yang diguncang oleh berbagai gejolak, pertentangan dan pemberontakan. Dia lahir pada masa pemerintah Khalifah Mu'tamid dan meninggal pada masa pemerintahan Khalifah Muti', suatu periode paling kacau dan tidak ada stabilitas politik sama sekali. Pada waktu itu timbul banyak macam tantangan, bahkan pemberontakan terhadap kekuasaan Abbasyiah dengan berbagai motif agama, kesukuan dan kebendaan. Banyak anak-anak raja dan pengusaha-pengusaha lama berusaha mendapatkan kembali wilayah dan kekayaan nenek moyangnya, khususnya orang Persia dan Turki. Mereka mencoba mencapai maksudnya dengan merongrong wibawah Khalifah dan bekerja sama dengan kelompok Syi'ah, keturunan Ali bin Abi Tholib, yang beranggapan lebih berhak memerintah dunia Islam daripada keturunan Abbas, paman Nabi itu. Situasi

³⁶ Yunastil Ali, *Perkembangan Pemikiran* 41.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Mungkin karena situasi politik yang demikian kacau, dan juga karena perkenalannya dengan karya-karya tulis pemikir Yunani seperti Plato dan Aristoteles, al-Farabi yang gemar berkhawatir, menyendiri dan merenung, merasa terpanggil untuk mencari pola kehidupan bernegara dan bentuk pemerintahan yang ideal.³⁷

Kehidupan al-Farabi banyak terbenam dalam dunia ilmu, sehingga tidak dekat dengan penguasa Abbasyiah. Dalam pada itu teori politiknya tidak didasarkan pada sistem pemerintahan yang ada, melainkan obyektif sesuai dengan idealismenya. Filsafat kenabian itulah yang tampak erat hubungannya dengan teori politiknya.³⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

³⁷ Munawir, *Islam Dan* 51.

³⁸ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam Dan Barat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), 76.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III

PEMIKIRAN POLITIK PLATO DAN AL-FARABI

Sebagaimana telah diungkapkan dalam bab pertama yaitu pendahuluan, bahwa kajian tentang politik merupakan suatu kajian yang berhubungan dengan kesempurnaan hidup manusia atau kebaikan hidup bersama. Maka upaya untuk sampai pada kesempurnaan hidup manusia atau kebaikan hidup bersama diperlukan adanya suatu wadah politik, maka wadah politik itu adalah suatu negara yang ideal agar masyarakatnya dapat hidup dengan nyaman.

Sebelum lebih jauh menelusuri konsep politik dalam mewujudkan negara ideal dalam pandangan Plato seorang filosof Barat yang dilanjutkan oleh Al-Farabi sebagai seorang filosof Muslim dan sekaligus seorang sufi, maka akan sedikit kita singgung definisi politik ataupun negara secara bahasa maupun secara umum dan khususnya dari sudut pandang filsafat.

A. Pengertian Politik

Politik dalam arti Inggris: *politic*; dari Yunani *politicos* (menyangkut warganegara) *polites* (seorang warga negara) *polis* (kota, negara) *politia* (kewargaan).

Sedangkan pengertian secara umum dapat diartikan dalam beberapa pengertian,

1. Apa yang berhubungan dengan pemerintahan.
2. Perkara mengelola, mengarahkan, dan menyelenggarakan kebijaksanaan umum dan keputusan-keputusan atau kebijaksanaan yang menyangkut partai-partai yang berperan dalam kehidupan bernegara.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Bidang setudi yang berkaitan dengan masalah-masalah sipil-sosial dan mengembangkan pendekatan-pendekatan terhadap pemecahan masalah-masalah tersebut.
4. Aktifitas yang berkaitan dengan relasi-relasi antara bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok sosial lainnya, yang berhubungan dengan kelompok dengan perkara penggunaan kekuasaan negara.¹

Pemahaman orang Yunani tentang "Politic" boleh dikatakan amat luas. Kata yang berasal dari bahasa mereka sendiri itu diartikan sebagai "negara kota". Menurut Aristoteles, hakekat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politic dan interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti melibatkan hubungan politik.²

Aristoteles menulis suatu risalah yang berjudul *Politeia*, yang judulnya sudah diterjemahkan sebagai *Politic (politics)*. Politik bagi Aristoteles merupakan cabang pengetahuan Praktis. Politik merupakan bagian dari etika yang berurusan dengan manusia dalam kegiatan kelompok. Manusia adalah makhluk-makhluk polis (negara-kota). Kecenderungan alamiah dari manusia ialah membentuk kelompok, bertindak dalam kelompok, dan bertindak sebagai kelompok. Maksud (tujuan, sasaran) politik sama dengan tujuan etika dan sama dengan tujuan kehidupan manusia pada umumnya.³

Dalam pengertian sehari-hari, politik berhubungan dengan cara dan proses pengelolaan pemerintahan suatu negara. Dengan demikian bagaimanapun politik didefinisikan. Politik tetap menyangkut dua hal pokok yaitu kekuasaan dan cara menggunakan kekuasaan.

¹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), 857.

² Carlton Clymer Rodee DKK, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993), 3.

³ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, 857.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Ada dua macam problem politik, yaitu:

1. Pemerintahan atas dasar penegak terhadap tindakan-tindakan yang sadar, cara hidup, disposisi politik. Dasar ini dapat diperoleh untuk kebahagiaan, dan pemerintah atas dasar demikian disebut pemerintahan utama, sebagai ciri kota dan bangsa yang tunduk terhadap pemerintahan.
2. Pemerintahan atas dasar penegakan terhadap tindakan-tindakan dan watak-watak dalam rangka mencapai sesuatu yang diperkirakan mendapat sesuatu kebahagiaan, maka muncul beraneka ragam bentuk pemerintah, apabila yang dikejar kejayaan semata dapat dianggap sebagai pemerintah yang rendah, jika mengejar kehormatan disebut pemerintahan kehormatan, dan pemerintahan kepada apa yang menjadi tujuannya.

Sedangkan dipandang dari kemampuan suatu pemerintahan, ilmu politik terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Kemampuan dalam melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat universal
2. Kemampuan yang disebabkan adanya ketekunan dalam aktivitas politik, dengan harapan menjadi kebijaksanaan.⁴

Dari berbagai devinisi politik di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa politik berhubungan dengan masalah-masalah antara lain :

1. Kekuasaan.
2. Cara menggunakan kekuasaan, yang menyangkut masalah praktek.
3. Konsep, yang menentukan bentuk dan corak politik.

⁴ H.A. Mustofa, *Filsafat Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 1997), 132.

B. Pengertian Negara

Istilah negara diterjemahkan dari kata-kata asing “Staat” (bahasa Belanda dan Jerman); “State” (bahasa Inggris); Etat (bahasa Prancis). Justru karena pertumbuhan negara modern dimulai di benua Eropa di sekitar abad ke-17. Istilah “staat” mempunyai sejarah tersendiri. Istilah itu mula-mula dipergunakan dalam abad ke-15 di Eropa-Barat. Anggapan umum yang diterima adalah bahwa kata “staat” (atate, etat) itu dialihkan dari kata bahasa Latin “status” atau “statum”.⁵

Teori yang digunakan dalam memberikan pengertian tentang asal-usul negara di sini adalah teori “perjanjian masyarakat atau kontrak sosial”. Teori ini menganggap bahwa, “perjanjian sebagai dasar negara dan masyarakat”. Mengenai persetujuan anggota-anggotanya dapat dinyatakan secara tegas (expressed) atau dianggap telah diberikan secara diam-diam (tacitly assumed).⁶ Sedangkan pengertian negara secara umum ada beberapa pengertian, antara lain :

1. Suatu entitas kolektif dengan batas-batas wilayah dan organisasi politik

yang menjalankan kekuasaan yang berdaulat. Istilah ini boleh jadi berasal

dari “estate of realm” (golongan-golongan) feodal seperti, misalnya, biarawan, bangsawan, dan awam. Wakil-wakil *estates* yang merupakan badan legislative yang pertama, kemudian dinamakan “states” (misalnya, States-General Holland). Machiavelli menggunakan istilah negara untuk menunjuk kepada entitas politik sendiri, dan penggunaan itu sekarang dipakai.

⁵ Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung : Putra Abardin, 1999), 90.

⁶ Cappy Haricahyono, *Ilmu Politik Dan Prespektifnya*, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1991), 43.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Yang hakiki bagi setiap negara adalah adanya rakyat. Rakyat adalah totalitas dari orang-orang yang membentuk negara. Negara sebagai suatu badan politik lokal mengandaikan suatu wilayah khusus sebagai basis dari negara. Untuk menjadikan negara sebagai organisasi yang sempurna harus dibentuk alat-alat negara yang berbeda sebagai pengemban otoritas negara yang sah. Bagaimanapun juga, bukanlah otoritas negara atau mereka yang menjalankannya yang menentukan negara. Sebaliknya negara yang menentukan alat-alatnya termasuk pejabat tertinggi negara. Dalam arti bagaimana alat-alat negara tertinggi merupakan pemegang otoritas negara, merupakan pokok yang diperdebatkan. Karena itu terdapat perbedaan pendapat bagaimana dan dalam kondisi bagaimana diperbolehkan untuk menghilangkan otoritas dari para pemegangnya. Bagaimanapun juga otoritas negara tidak merupakan otoritas atas negara, tetapi otoritas dari negara atas masalah-masalahnya dan atas warga negara sejauh otoritas ini meningkatkan kesejahteraan umum, tetapi tidak melampauinya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Apa yang dinamakan pembagian kekuasaan semata-mata merupakan pembagian fungsi yang berbeda kepada alat-alat negara yang berbeda. Dengan cara ini ada jaminan bahwa masing-masing fungsi akan dilaksanakan secara tepat. Bersamaan dengan itu sistem pengecekan dan pertimbangan dimaksudkan agar alat negara tidak menjadi terlampau berkuasa dan dengan demikian mampu menggunakan kekuasaannya secara bertentangan dengan kesejahteraan umum.⁷

Pandangan Beberapa Filosof Tentang Negara Dan Asal Usulnya

⁷ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, 691-693

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Aristoteles memandang negara sebagai ciptaan alam, karena manusia yang hidup sendirian tidak dapat mencukupi dirinya sendiri dan dengan demikian harus dianggap sebagai suatu bagian dalam hubungan dengan keseluruhan.
2. Hobbes memandang negara sebagai suatu “makhluk buatan”, hasil karya manusia dan mewakili kekuasaan-kekuasaan manusia terbesar, yang sesungguhnya adalah “Allah yang dapat mati”. Namun, negara tidak bersifat organik tetapi melulu agregat (gerombolan) bagian-bagiannya.
3. Rousseau menganggap negara sebagai suatu “pribadi publik”, “pribadi moral” yang kehidupannya harus ditemukan dalam “persekutuan anggota-anggotanya”. Kurang jelas pernyataannya bahwa tubuh politik disebut “state” (negara) bila ia pasif, dan “sovereign” (berdaulatan) bila aktif.
4. Bagi Kant, yang memandang negara sebagai sesuatu yang berlandaskan prinsip legislasi universal, tahap final adalah “persatuan universal negara-negara” dalam “suatu kongres permanen bangsa-bangsa”.
5. Hegel menambah penekanan pada kehidupan, pemikiran, dan kesadaran sebagai karakteristik negara. Ia juga berpendapat bahwa negara harus dihormati sebagai yang ilahi di bumi, dan “gerakan Allah” di dunia. Negara lalu, menurutnya, menjadi suatu organisme yang hidup dan ilahi.⁸

Lahirnya ide negara sudah dapat ditemukan sejak manusia merupakan makhluk sosial atau untuk lebih tepat lagi sejak manusia merupakan “Politicon Zoon”, jika ada kebenaran mutlak dalam alam yang serba relatif ini, maka kebenaran itu adalah bahwa manusia itu makhluk sosial, maka pada diri manusia sudah tertanam niat berorganisasi. Organisasi sekalipun tidak sama dengan ketertiban, namun merupakan

⁸ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* 693-694.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 dua muka dari satu medali yang sama. Organisasi secara implicit mencakup pengertian ketertiban. Negara adalah suatu bentuk yang terjelma dari hasrat berorganisasi manusia.⁹

Ibnu Abi Rabi' berpendapat bahwa manusia, orang-orang, tidak mungkin dapat mencakup kebutuhan alaminya sendiri tanpa bantuan yang lain, dan oleh karenanya mereka saling memerlukan. Hal itu mendorong mereka saling membantu dan berkumpul serta menetap di satu tempat. Dari proses demikianlah maka tumbuh kota-kota atau negara.¹⁰

Al-Mawardi juga berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tetapi al-Mawardi memasukkan unsur agama dalam teorinya. Menurut al-Mawardi adalah Allah yang menciptakan kita supaya tidak sanggup memenuhi kebutuhan kita orang-seorang, tanpa bantuan orang lain, agar kita selalu sadar bahwa Dia-lah pencipta kita dan pemberi rezeki, dan bahwa kita membutuhkan Dia serta memerlukan pertolongan-Nya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan manusia dalam keadaan lemah tanpa memberi hal-hal yang akan memandu manusia ke arah tercapainya kebahagiaan hidup. Karenanya Allah memberikan kepada manusia otak yang akan menuntunnya berperilaku tertentu dan bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat.¹¹

Al-Ghazali juga berpendapat bahwa manusia itu makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendiri, yang disebabkan oleh dua factor: *pertama*, kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup umat manusia – hal ini hanya mungkin melalui pergaulan antara laki-laki dan perempuan serta keluarga; dan *kedua*, saling membantu dalam penyediaan bahan makanan, pakaian dan pendidikan anak. Demi kesehatan dan

⁹ Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, ... 93.

¹⁰ Munawir Sdzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta : UI-Press, 1993), 43.

¹¹ *Ibid*, 60.

keamanannya dia memerlukan tempat tinggal atau rumah yang kokoh dan kuat untuk melindunginya dari udara panas, udara dingin, hujan dan gangguan orang-orang jahat atau pencuri dan serangan dari luar. Untuk itu semua diperlukan kerjasama dan saling membantu antar sesama manusia, antara lain dengan membangun pagar-pagar tinggi disekeliling pusat perumahan, dan disanalah lahir negara karena dorongan kebutuhan bersama.¹²

C. Pemikiran Politik Plato

Dalam pemikiran politik Plato berbeda dengan filsafat politik modern, yang mempersoalkan masalah perorangan dan haknya, dan juga berbeda dengan filsafat politik kontemporer yang cenderung membahas istilah politik seperti : “kebebasan, kewibawaan, kekuasaan, hak asasi, kewajiban, kesepakatan atau persetujuan demokrasi dan keadilan “. Tetapi filsafat politik Plato berupaya membahas dan menguraika berbagai segi kehidupan manusia dalam hubungannya dengan negara.¹³

1. Pandangan Plato Tentang Negara Utama

Plato mempunyai pandangan tentang negara utama, yitu bahwa negara utama adalah suatu negara yang mengupayakan kesenangan dan kebahagiaan bagi manusia. Hal ini sesuai dengan ajaran etik yang dikembangkan Plato, bahwa tujuan negara itu sinkron dengan tujuan hidup manusia yaitu : kesenangan dan kebahagiaan warganya.¹⁴

Plato mengemukakan adanya analogi antara jiwa dan negara. Apa hakikat jiwa itu, begitulah hakikat negara. Unsur yang dijumpai pada jiwa, dijumpai pula pada negara. Menurut pemikiran ini, pada jiwa itu terdapat unsur keinginan, seperti lapar,

¹² Munawir, *Islam Dan Tata Negara* 74 - 75

¹³ J.H. Rapar, *Filsafat Politik* 1.

¹⁴ *Ibid*, 63.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 dahaga, dan cinta. Kemudian ada pula unsur *logos* (akal) yang dengannya manusia dapat belajar mengetahui sesuatu, dan karena mengetahui itu maka manusia mencintainya pula. Di antara kedua unsur itu dijumpai unsur semangat, yang menyangkut soal kehormatan. Unsur ini memberikan inspirasi kepada manusia untuk bertempur, tetapi bukan didorong oleh ambisi atau keinginan, melainkan karena di dorong oleh rasa berontak terhadap ketidakadilan, dan rasa tunduk pada keadilan. Dalam jiwa, kata Plato, unsur ini berada di tengah di antara kedua unsur yang lain tadi, disertai kecenderungan untuk berpihak pada akal.¹⁵

Persoalan pokok di dalam negara ialah keselamatan para orang yang diperintah, bukan keselamatan para orang yang memerintah. Para orang yang memerintah harus mempersembahkan hidup mereka bagi pemerintahan, dengan mengorbankan kepentingan diri sendiri.¹⁶

Bagi Plato, sumber kekuasaan itu bukan pangkat, kedudukan, atau jabatan, juga bukan harta milik dan kekayaan dan bukan pula dewa atau apa pun yang dianggap ilahi. Plato menobatkan filsafat atau ilmu pengetahuan menjadi yang mulia yang harus duduk diatas tahta pemerintahan negara ideal karena hanya pengetahuanlah yang dapat membimbing dan menuntun manusia datang pada pengenalan yang benar akan segala sesuatu yang ada dalam keberadaannya yang sempurna di dunia ide.¹⁷

Para orang yang memerintah memerlukan pendidikan yang melebihi golongan-golongan yang lain. Mereka harus mulai mempelajari kesenian, persajakan dan musik, dan lain-lainnya. Setelah berumur 20 tahun mereka harus belajar filsafat hingga sampai berumur 30 tahun, yang meliputi segala cabang ilmu pasti, sebagai

¹⁵ Delia Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, (Bandung : Mizam Pustaka, 1997), 10.

¹⁶ Harun Hadiwijowo, *Sari Sejarah Filsafat Barat I*, (Yogyakarta : Kanisius, 1995), 43.

¹⁷ J.H. Rapar, *Filsafat Politik* 97.

latihan berpikir, dan sesudah itu dialektika guna mencakapkan mereka memandangi kepada idea-idea, terlebih-lebih kepada idea "kebaikan". Sesudah itu 15 tahun mereka harus menunaikan segala macam jabatan kenegaraan. Baru setelah berumur 50 tahun mereka diperbolehkan menjabat sebagai pemimpin untuk memerintah.

Para orang yang memerintah tidak diperkenankan mempunyai milik pribadi dan keluarga sendiri. Sebab semuanya itu menggoda orang untuk menganakemaskan keluarga sendiri.

Tugas para negarawan adalah menciptakan keselarasan antara semua keahlian, agar supaya keselarasan itu terjamin. Umpamanya: jenderal harus pandai berperang, negarawa harus pandai memutuskan bilamana orang harus perang, hakim harus pandai mengadili yang baik, dan sebagainya.¹⁸

Menurut Plato, keadilan akan tercipta kalau anggota masing-masing kelas mengerjakan tugasnya tanpa mencapuri tugas kelas-kelas yang lain. Selain dalam keadaan yang luar biasa, tidak dibenarkan terjadinya mobilitas vertical antara tiga kelas tersebut. Mobilitas itu baru dapat terjadi kalau misalnya seorang anak dari kelas pemimpin ternyata tidak memiliki bakat dan kemampuan untuk memimpin, atau gagal dalam pendidikan, maka dia dapat diturunkan ke kelas di bawahnya. Mobilitas juga dapat terjadi kalau ada seorang dari kelas bawah (kelas kedua atau ketiga) memiliki kemampuan yang luar biasa, dia dapat dinaikkan ke kelas diatas kelasnya.¹⁹

Adapun klasifikasi negara yang diuraikan Plato di dalam *Politicus* dan yang kemudian digunakan dan menjadi titik berangkat dari pemikiran-pemikiran politik Aristoteles dalam *Policuanya*, dikembangkan oleh Plato dari pembagian tradisional

¹⁸ Harun Hadiwijono, *Sari sejarah* 44.

¹⁹ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara* 54.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
yang terdiri dari tiga bentuk yang kemudian dibagi-bagi lagi ke dalam penggolongan yang mengenal hukum dan yang tak mengenal hukum.²⁰

Dengan demikian ada enam bentuk negara, yakni tiga bentuk dari golongan yang mengenal hukum dan tiga bentuk yang tak mengenal hukum. Dari golongan yang mengenal hukum, yaitu negara yang memiliki undang-undang; bentuk yang terbaik ialah monarki, lalu aristokrasi, dan kemudian demokrasi. Sedangkan dari golongan yang tak mengenal hukum, yakni negara yang tidak memiliki undang-undang; bentuk negara yang paling baik ialah demokrasi, kemudian oligarki, dan yang terburuk ialah tirani. Yang menarik dari teori Plato yang terakhir itu ialah adanya dua bentuk demokrasi, yakni demokrasi dari negara yang memiliki undang-undang dan demokrasi dari negara yang tidak memiliki undang-undang. Demokrasi dari negara yang memiliki undang-undang adalah bentuk yang terburuk, sedangkan demokrasi dari negara yang tak memiliki undang-undang adalah bentuk yang terbaik. Jelas pula terlihat bahwa ke dua bentuk demokrasi itu memiliki tempat yang lebih baik daripada oligarki yang di dalam *Republik* menempati urutan di atas demokrasi.²¹

2. Pembagian Masyarakat

Manusia memiliki begitu banyak keinginan dan kebutuhan yang tak dapat dipenuhi dengan kekuatan dan kemampuan sendiri, maka manusia lalu bersatu dan bekerja sama. Kerja sama manusia demi kepentingan bersama, maka berangkat dari sinilah manusia itu hidup bermasyarakat.

²⁰ J.H. Rapar, *Filsafat Politik* 72.

²¹ *Ibid*, 73.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Di dalam negara ideal Plato membagi masyarakat ke dalam beberapa kelas,

sejajar dengan ajarannya mengenai pembagian jiwa manusia. Ajaran Plato mengenai pembagian jiwa manusia dikenal dengan nama “teori Plato tentang tiga bagian jiwa” (*Plato’s tripartite theory of the soul*) yang mengatakan bahwa jiwa manusia terbagi ke dalam tiga bagian yang sesuai dengan kapasitas alami yang dimilikinya dan juga yang membedakannya dari segala makhluk hidup lainnya. Yang pertama dari ketiga bagian itu ialah *fikiran* atau *akal* (*nous*) yang merupakan *bagian rasional*, yang kedua ialah *semangat* atau *keberanian* (*thumos*), dan yang ketiga ialah *keinginan*, *nafsu* atau *kebutuhan* (*epithumia*). Menurut Plato, negara ideal pun terbagi ke dalam tiga kelas yang sejajar dengan pembagian jiwa manusia tersebut di atas. Plato mengatakan,

... Both city and each soul of man have their classes, the same in each and the same number.

... negara dan tiap-tiap jiwa manusia memiliki kelas-kelasnya, yang masing-masing serupa dan berjumlah sama.²²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam ajarannya tentang jiwa manusia, Plato menghubungkan ke tiga bagian jiwa itu dengan empat *kebajikan pokok* (*cardinal virtues*) yang juga disebut sebagai *moralitas jiwa* (*soul’s morality*) atau *keutamaan* (*excellence*). Ke empat kebajikan pokok itu ialah *pengendalian diri* (*temperance*), *keperkasaan* (*fortitude*), *kebijaksanaan* atau *kearifan* (*prudence*), dan *keadilan* (*justice*). Fikiran atau akal, dihubungkan dengan kebijaksanaan atau kearifan, semangat atau keberanian, dihubungkan dengan keperkasaan, sedangkan keinginan, nafsu atau kebutuhan dihubungkan dengan pengendalian diri. Adapun ke tiga bagian jiwa itu secara

²² J.H. Rapar, *Filsafat Politik*, 75.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 keseluruhan dihubungkan dengan keadilan untuk memelihara keselarasan dan keseimbangan antara masing-masing bagian jiwa tersebut.²³

Menurut Plato, golongan-golongan di dalam negara yang ideal harus terdiri dari 3 bagian, yaitu :

1. Golongan yang tertinggi, yang terdiri dari para yang memerintah, yang oleh Plato disebut para penjaga, yang sebaiknya terdiri dari para orang bijak (filsuf), yang mengetahui apa yang baik.
2. Golongan Pembantu, yaitu para prajurit, yang bertujuan menjamin keamanan, menjamin ketaatan para warga negara kepada pimpinan para penjaga,
3. Golongan terendah, yang terdiri dari rakyat biasa, para petani dan tukang serta para pedagang, yang harus menanggung hidup ekonomi negara.²⁴

Ada orang yang mengira pembagian kelas dan golongan dalam negara yang dilakukan Plato merupakan pengkotak-kotakkan, pemisahan atau diskriminasi sosial yang serupa dengan kasta. Sesungguhnya Plato tidak bermaksud demikian. Plato tidak berusaha memisah-misahkan dan membedakan kelas dan golongan itu dengan tegas sebagaimana yang digambarkan oleh banyak orang. Kasta keanggotaannya bersifat turun-temurun, sedangkan kelas dan golongan tidak demikian. Walaupun memang Plato berpendapat bahwa pada umumnya anak-anak dari kelas dalam golongan para penjaga akan memiliki kemampuan intelektual dan keberanian yang sama seperti orang tuanya namun apabila ternyata bahwa seorang anak dari salah satu kelas dalam golongan para penjaga memiliki bakat dan keterampilan yang cocok bagi kelas penghasil dari golongan karya, maka ia harus pindah ke kelas dalam golongan

²³ J.H. Rapar, *Filsafat Politik* 76.

²⁴ Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat* 44.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 karya itu, demikian pula apabila seorang anak dari kelas dalam golongan karya ternyata memiliki kemampuan intelektual atau keperkasaan yang cocok bagi kelas dalam golongan para penjaga, maka ia harus segera pindah dan beralih ke kelas dan golongan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Jelas terlihat bahwa Plato bebas dari segala prasangka kelas atau prasangka golongan.²⁵

Cita-cita Plato yang luhur ialah agar setiap warga negara ideal memperoleh kesempatan yang sama untuk menunaikan tugas panggilannya dalam hidup bernegara, yang sesuai dengan bakat, kecakapan, kemampuan, keterampilan, keperkasaan, dan kesanggupan intelektual serta pengalamannya.

Perlu ditekankan bahwa pembagian kelas dan golongan yang dilakukan Plato bukanlah untuk menciptakan diskriminasi kelas atau diskriminasi golongan yang akan menimbulkan keretakan dan perpecahan yang akhirnya akan membuat negara itu hancur. Negara ideal Plato adalah negara yang justru harus senantiasa menjaga keutuhannya dan harus senantiasa berusaha memelihara kesatuannya. Sebagaimana digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id yang telah pernah diungkapkan sebelumnya, apabila Plato mengatakan bahwa wilayah negara itu tidak boleh terlalu luas, adalah karena dorongan kerinduannya yang begitu kuat untuk menjaga agar keutuhan dan kesatuan negara itu dapat dipertahankan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Apa yang hendak diungkapkan Plato lewat pembagian kelas dan golongan ialah agar kedudukan, fungsi, dan jabatan, serta tugas dan tanggung jawab setiap orang di dalam negara diatur sesuai dengan asas: *orang yang tepat di tempat yang tepat*.²⁶

3. Politik Kenegaraan.

²⁵ J.H. Rapar, *Filsafat Politik* 77.

²⁶ *Ibid*, 78.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam soal politik kenegaraan Plato banyak berbicara tentang pemimpin negara. Karena menurut plato bahwa orang yang pantas untuk memimpin suatu negara adalah seorang filosof , sebagaimana yang telah ditulis dalam buku *The Dialogues of Plato* "Seorang filosofi adalah raja atau raja dan pangeran di dunia yang mempunyai semangat dan kekuatan dalam berfilsafat"²⁷. Di samping itu Plato juga berpendapat bahwa kesenangan yang ditemukan dalam pengetahuan kebenaran hanya diketahui pada ahli filsafat. Karena pengalamannya yang kemudian akan menilai lebih baik daripada yang lain.²⁸

Para pemimpin negara diambil dari antara para penjaga, dari mereka yang paling mendalami filsafat. Itulah paham Plato tentang raja-filosof. Filosof adalah orang yang sanggup untuk melihat idea-idea atau hakikat-hakikat rohani di belakang bayang-bayang alam inderawi yang berubah-ubah. Hal itu mungkin karena ia telah mengatasi keterikatan pada nafsu dan indera dan dengan demikian bebas dari pamrih. Seorang filosof dapat memimpin masyarakat dengan berorientasi pada ide metafisik tertinggi, idea kebaikan.²⁹

Politikos (Negarawan) merupakan suatu dialog yang tidak begitu panjang, kalau dibandingkan dengan *politeia* dan *Nomoi*. *Politikos* mengatakan tentang bentuk negara, bahwa sebaiknya undang-undang dibuat sejauh dirasakan perlu menurut keadaan yang konkret, kira-kira seperti dokter selalu mengganti obat menurut keadaan pasiennya. Dengan tepat sekali plato melukiskan kekurangan-kekurangan yang melekat pada undang-undang yang bersifat umum. Undang-undang tidak mampu memerintahkan yang paling baik untuk setiap kasus konkret. Keadaan manusia dan

²⁷ Translated by Benjamin Jowett, *The Dialogues of Plato*, (Chicago : Oxford Universiti Press, 1986), 369.

²⁸ *Ibid*, 422.

²⁹ Frans Magnis-suseno, *Etika Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), 188.

perbuatan-perbuatannya senantiasa berubah, sehingga sukar diselenggarakan dengan peraturan-peraturan yang sama. Akan tetapi membuat undang-undang yang cocok dengan tiap-tiap situasi menuntut pengetahuan dan kecakapan yang adimanusiawi. Itu tidak mungkin dilaksanakan oleh seorang manusia. Rupanya dengan itu Plato meninggalkan cita-citanya dalam *Politeia* mengenai filsuf yang menjadi pemimpin negara, karena dianggap kurang praktis. Secara konkret adanya undang-undang umum harus dianggap sebagai "the second best". Karena alasan-alasan praktis, undang-undang harus dipandang sebagai instansi tertinggi dalam negara dan negarawan yang menyimpang dari undang-undang harus dihukum mati.

Sebab negara yang berdasarkan pengetahuan satu orang (filsuf) yang membuat undang-undang untuk setiap kesempatan konkret dianggap tidak mungkin, Plato berpendapat bahwa dalam negara dimana terdapat undang-undang dasar, bentuk negara yang paling baik adalah monarki, bentuk negara yang kurang baik adalah aristokrasi dan bentuk negara yang paling buruk adalah demokrasi. Tetapi jika tidak ada undang-undang dasar, harus dikatakan sebaliknya. Dalam negara yang tidak mempunyai undang-undang dasar, bentuk negara yang paling buruk adalah monarki, bentuk negara yang lebih baik adalah aristokrasi dan bentuk negara yang paling baik adalah demokrasi. Maksudnya ialah bahwa dalam negara di mana tidak ada undang-undang, demokrasi itu sebagian dapat menjamin agar kekuasaan negara jangan disalahgunakan, sedangkan monarki dalam keadaan serupa itu akan menjadi kelaliman semata-mata.³⁰

Dengan demikian politik kenegaraan plato lebih menitik beratkan pada sistem pemerintahan dan undang-undang yang tepat untuk suatu negara. Dalam politik

³⁰ K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, (Yogyakarta : Kanisius, 1999), 149-150.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 kenegaraan Plato tidak setuju jika suatu negara dipimpin oleh seorang filosof. Di samping itu Plato berpendapat bahwa undang-undang harus dipandang sebagai instansi tertinggi dalam negara.

D. Pemikiran Politik Al-Farabi

Dalam pemikiran al-Farabi, politik menduduki tempat yang paling penting karena bagian filsafatnya mempunyai tujuan politik. Namun politik bukanlah tujuan dalam dirinya, tetapi sebagai sarana untuk memperoleh tujuan terakhir bagi manusia, yaitu kebahagiaan dengan memiliki sifat-sifat keutamaan yang dicapai, oleh karena itu al-Farabi berpendapat bahwa ilmu politik adalah ilmu yang meneliti berbagai bentuk tindakan, corak hidup, watak dan akhlak.

Adapun pemikiran al-Farabi tentang filsafat politik antara lain mengenai :

1. Tentang Negara Utama

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Mengenai pandangan tentang negara al-Farabi menulis sebuah buku yang terkenal dengan judul *Ara'u Ahli'l-Madinah al-Fadhilah*. Dalam uraiannya tentang "Negara Utama" (al – Madinatul – fadhilah) itu al-Farabi menegaskan bahwa negeri yang utama ialah negeri yang memperjuangkan kemakmuran dan kebahagiaan warga negaranya.³¹

Hubungan dunia dengan Tuhan itu dapat menjadi teladan antara masyarakat dengan raja. Menurut al-Farabi negara yang utama ialah kota

³¹ Porwanata. A. Ahmadi. Rosali, *Seluk Beluk Filsafat Islam*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1994),138.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
(negara) yang warga-warganya tersusun menurut susunan alam besar (makrokosmos) atau menurut susunan alam kecil (mikrokosm).³²

Negara utama menyerupai badan yang sempurna dan sehat, dimana anggota badannya saling bekerja sama dengan sempurna. Kedudukan masing-masing anggota badan beraneka ragam, ada yang menduduki posisi penting (utama) dan ada juga yang cuma sebagai pelengkap. Satu anggota badan yang utama adalah hati. Kemudian menyusul anggota yang lain yang berkedudukan di bawah hati, bagian tersebut berposisi sebagai pembantu hati. Hal ini berlanjut terus sampai bagian selanjutnya, di mana bagian yang lebih rendah menjadi pembantu bagi bagian yang di atasnya. Sampai bagian yang paling bawah, dimana tidak ada lagi yang dia pimpin, sehingga dia hanya berposisi sebagai pembantu. Hal ini layaknya tatanan sebuah negara, dimana bagian-bagiannya beraneka ragam dan memiliki spesifikasinya masing-masing.

Seperti halnya anggota badan yang paling penting, dia adalah anggota yang paling sempurna diantara anggota yang lain, baik dari segi fisik maupun non fisik, sementara anggota yang lain berposisi sebagai pembantunya, sementara anggota yang duduk di posisi tertentu di bawahnya masih ada posisi lain yang lebih rendah, maka iapun menjadi pemimpin bagi bagian dibawahnya, sekaligus pembantu di atasnya. Proses ini berlangsung terus sampai anggota badan yang paling bawah.³³

Pemimpin negara fadilah tidak mungkin dari sembarang orang walaupun sesuai dengan kesepakatan, karena, pemimpin memiliki dua syara,

³² H. Ahmad sjadzali Mudjakir, *Filsafat Umum*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1997), 169.

³³ Al-Farabi, *Ara-Ahli 'l-Madinah al-Fadilah*, (Kairo : Muhammad Ali Shubaih, tt), 73-74.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
yakni, pertama, secara fitrah dia memang diposisi yang utama. Kedua, dia memiliki karakter dan kemampuan kepemimpinan. Kepemimpinan yang diperoleh karena fitrah dirinya memang menjadi pemimpin tidak akan diperoleh oleh orang lain, karena fitrah di luar dirinya adalah pembantu baginya. Posisi mayoritas adalah pelayan karena dari posisi pemimpin mesti ada pembantu dibawahnya begitu seterusnya posisi pembantu muncul dari atas sampai bawah, bahkan pada penghujung urutan yang tersisa adalah posisi pembantu. Oleh karena itu, dalam negara utama, atau dalam suatu keahlian tertentu di negara mana saja, pemimpin yang utama adalah pemimpin yang tertinggi (mempunyai otoritas tertinggi) di mana tidak ada lagi posisi yang lebih tinggi darinya yang bisa memerintahnya, seperti layaknya bagian tubuh yang utama, dia tidak mungkin diperintah oleh bagian yang lebih rendah darinya. Begitu pula kalau kepemimpinan dalam kelompok di negara fadilah, maka pemimpin kelompok yang pertama hendaknya memiliki kemampuan yang tertinggi dan tidak di bawah yang lain, dan tidak diperintah oleh yang lain. Bahkan kepandaiannya beserta tujuan kepemimpinannya diarahkan bagi semua komponen warga untuk kebaikan negara fadilah.³⁴

Untuk menjadi Kepala negara Utama dia harus adil, bisa memimpin dengan baik, tak keras kepala (egois) mudah bila diajak kejalan keadilan dan sulit bila diajak kejalan kekejian dan kenistaan. Dia juga harus memiliki kemauan yang kuat untuk bertindak bagi tindakan yang seyogyanya dia lakukan dengan berani tanpa dilingkupi rasa takut serta tak lemah jiwanya. Syarat ini sulit dimiliki oleh satu orang, oleh karena itu secara fitrah syarat itu dipenuhi

³⁴ Al-Farabi, *Ara' u Ali' l-Madinah* 79.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

satu persatu serta hal yang demikian merupakan sesuatu yang jarang ditemukan dalam masyarakat. Jika benar-benar ditemukan dalam negara utama seorang yang memenuhi syarat-syarat diatas keenam-enamnya atau lima saja tanpa ada yang menyerupai dengan menggunakan potensi “mutakholiyahnya” maka dia adalah pemimpin itu. Jika memang tidak ditemukan tipe pemimpin tersebut, maka ditetapkan pemimpin sesuai dengan rujukan syari’at dengan diadakannya seorang pemimpin kedua yang menggantikannya. Profil pemimpin kedua ini sudah diamati sejak lahir, masa kecilnya, secara bertahap dia memenuhi syarat-syarat di atas sehingga ketika dia dewasa keenam syarat diatas dipenuhinya. Salah satu syarat yang utama adalah kebijaksanaan yang identik dengan seorang filsuf. Selanjutnya, dia harus ‘alim, hapal syari’at dan hadis serta perilaku yang dicontohkan oleh ulama’ terdahulu. Syarat tersebut dia harus memenuhi 12 karakter, salah satunya adalah dia harus memiliki kesempurnaan anggota badannya. Dan anggota badan tersebut siap bertindak apabila diperlukan dengan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pemenuhan yang mudah dan cekatan. Dia memiliki pemahaman yang baik dan penggambaran suatu hal yang baik pula. Penggambaran tersebut terlontar sesuai dengan masalah yang harus dipecahkan. Serta dia harus memiliki daya ingat yang baik tentang apa yang dipahaminya, dilihatnya, didengarnya, dan yang diketahuinya, semuanya itu harus dimiliki oleh kepala negara Utama.³⁵

Di dalam buku Kuliah Filsafat Islam Ahmad Daudy berpendapat bahwa, tidak semua warga berhak menjadi Kepala Negara Utama. Untuk tugas ini diperlukan dua syarat : pertama, secara natural ia dipersiapkan untuk itu dan kedua, memiliki kemampuan kehendak. Artinya, orang yang telah sempurna,

³⁵ Al-Farabi, *Ara' u Ahli'l-Madinah* 81.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 sehingga mampu berhubungan dengan akal aktif. Melalui hubungan ini, kepala negara utama dapat menerima langsung makrifah dari akal aktif, baik pada waktu jaga maupun pada waktu tidur. Makrifah atau wahyu tidaklah berasal darinya, tapi dari Tuhan yang telah menjadikannya sebagai perantara bagi wahyu yang diturunkan kepada Kepala Negara Utama. Maka untuk menjadi Kepala Negara Utama diharuskan memiliki dua belas sifat yang merupakan wataknya, sifat-sifat itu adalah : 1. Sehat anggotanya, 2. Baik pemahamandan pemikiran serta hafal akan apa yang diketahui, 3. Cerdik lagi cerdas, 4. Bagus bahasanya, 5. Mencintai ilmu dan pengajaran, 6. Tidak rakus pada makan, minum dan kawin, 7. mencintai kebenaran serta membenci kebohongan, 8. Besar jiwa, mencintai kemuliaan, 9. Tidak berharga padanya dinar dan dirham, 10. Mencintai keadilan, membenci kedholiman, 11. Kuat cita-cita, tidak penakut dan tidak lemah mental, 12. Adil, tidak sukar memimpin dan tidak ambisius.³⁶

Di samping negara utama, terdapat empat jenis negara lain yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 merupakan lawan-lawan dari negara utama tersebut, yaitu:

1. Negara yang bodoh (Al-Madinah al-Jahilah) ialah suatu negeri di mana penduduknya tidak mengenal kebahagiaan, ini tidak terlintas di dalam hatinya, walaupun ditunjukkan atau diingatkan, maka mereka tidak lain mempercayainya dan tidak mencarinya, di katakan baik menurut mereka adalah badan sehat, cukup harta, dapat memperoleh kesenangan materi.³⁷
 Negara yang bodoh itu ada bermacam-macam. Ada negara yang sangat primitif, yang perhatian rakyatnya hanya terbatas pada pemenuhan

³⁶ Ahmad Daudy, *Kuliah Filsafat Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1986), 51-52.

³⁷ Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1991), 97.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kebutuhan hidup seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan jodoh, serta kerjasama untuk pengadaan keperluan tersebut. Ada negara yang lebih maju, tetapi perhatian rakyatnya terpusat pada kerjasama untuk meningkatkan kemudahan-kemudahan materi dan penumpukan kekayaan. Ada negara yang tujuan hidup rakyatnya adalah untuk menikmati makanan, minuman, seks dan berbagai hiburan yang lain. Ada negara yang tujuan hidup rakyatnya adalah untuk dihormati, dipuji dan tersohor dalam pergaulan antar bangsa. Ada negara yang perhatian rakyatnya terpusat pada nafsu untuk manaklukkan negara-negara lain, dan bangga dapat menguasai negara-negara tetangganya.³⁸

2. *Negara Fasik*, dalam negara ini warga negara mengetahui kebahagiaan dan jalan untuk mencapainya seperti halnya warga Negara Utama, tapi amal mereka seperti warga Negara jahil. Mereka percaya dan berkata, tapi tidak bekerja.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. *Negara Sesat*, warga negaranya mempunyai kepercayaan sesat dan buruk sangka terhadap Allah dan Akal Aktif. Kepala Negaranya menipu manusia dengan menyatakan dirinya menerima wahyu (wangsit).

4. *Negara Berubah (Mutabaddilah)*, Pada mulanya, warga negaranya memiliki kepercayaan yang sesat dan perbuatan yang keji.

Demikianlah garis besar konsepsi al-Farabi tentang negara. Dalam hal ini, ia tampak sebagai filosof teoritis, jauh dari kenyataan realis, memandang bahwa orang yang mampu berhubungan dengan Akal Aktif memiliki otoritas

³⁸ Munawir Sadjazi, *Islam Dan Tata Negara*, 57.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 untuk menjadi Kepala Negara, bahkan untuk mengajar dan membimbing warga negaranya ke jalan yang menjamin mereka kebahagiaan abadi.³⁹

2. Pembagian Masyarakat.

Dalam bahasa Inggris masyarakat adalah "society", yang berasal dari kata "socius", artinya kawan; sedangkan kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu "Syirk", artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu ada bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan disebabkan oleh manusia atau seseorang, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan. Manusia, mulai dari lahir sampai mati sebagai anggota masyarakat, mereka saling bergaul dan berinteraksi, karena mempunyai nilai-nilai, norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama. Demikian, bahwa hidup dalam masyarakat berarti adanya interaksi sosial dengan orang-orang di sekitar dan dengan demikian mengalami pengaruh dan mempengaruhi orang lain. Interaksi sosial sangat dalam tiap masyarakat.⁴⁰

Setiap manusia mempunyai fitrah dalam rangka menjalani kehidupannya dan mencapai kesempurnaannya untuk membutuhkan banyak hal yang tidak mungkin dikerjakan sendiri. Ia membutuhkan masyarakat yang masing-masing berposisi untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Oleh karena itu, manusia tidak mungkin memperoleh kesempurnaannya tanpa adanya masyarakat yang saling bekerja sama, serta satu individu melakukan hal yang dibutuhkan individu yang lain dan begitu seterusnya sehingga membentuk suatu

³⁹ Ahmad Daudy, *Kuliah Filsafat*, 53.

⁴⁰ Wahyu, *Wawasan Ilmu Sosial dasar*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1986), 60.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
kerja sama. Saling ketergantungan ini terwadahi dalam komunitas yang disebut masyarakat, untuk mencapai tujuan kesempurnaan. Bila hal ini terwujud, masing-masing individu akan berkembang dalam kemakmuran yang diwadahi oleh komunitas yang disebut masyarakat. Bentuk masyarakat ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Masyarakat yang sempurna dibagi menjadi tiga yakni: besar, menengah dan kecil.

Masyarakat sempurna yang besar, adalah masyarakat yang semuanya berada dalam kemakmuran. Menengah, berarti masyarakat yang sempurna yang berkelompok dalam satu bagian didalam masyarakat yang makmur. Kecil, berarti penduduk kota, berada di salah satu dari tempat tinggal masyarakat yang makmur. Sedangkan masyarakat yang tak sempurna adalah masyarakat dari bagian yang terkecil, yakni kelompok serumah, sejalur, selokasi atau satu desa yang merupakan anggota satu negara yang tidak dalam kemakmuran. Yang lebih baik dan utama adalah bahwa kemakmuran dicapai oleh komunitas yang paling besar kemudian diteruskan oleh komunitas di bawahnya yang kesemuanya dicapai dengan usaha dan upaya yang keras.⁴¹

Adapun masyarakat sempurna besar adalah gabungan banyak bangsa yang sepakat untuk bergabung dan saling membantu serta kerjasama. Masyarakat sempurna sedang adalah masyarakat yang terdiri dari satu bangsa yang menghuni di satu wilayah dari bumi ini. Sedangkan masyarakat sempurna kecil adalah masyarakat yang terdiri dari para penghuni satu kota. Atau dengan kata lain, masyarakat sempurna besar adalah perserikatan bangsa-bangsa,

⁴¹ Al-Farabi, *Ara' u Ahli 'l-Madinah*, 71.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
masyarakat sempurna sedang adalah negara nasional, dan masyarakat sempurna kecil adalah negara-kota.

Masyarakat-masyarakat yang tidak sempurna menurut al-Farabi adalah penghidupan sosial di tingkat desa, kampung, lorong dan keluarga; dan di antara tiga bentuk pergaulan yang tidak atau belum sempurna itu, maka kehidupan sosial di dalam rumah atau keluarga merupakan masyarakat yang paling tidak sempurna. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat lorong. Masyarakat lorong merupakan bagian dari masyarakat kampung, dan masyarakat kampung merupakan bagian dari masyarakat negara-kota. Terbentuknya kampung dan desa, keduanya diperlukan oleh negara-kota. Hanya bedanya, kampung merupakan bagian dari negara-kota, sedangkan desa hanya merupakan pelengkap untuk melayani kebutuhan negara-kota. Tampaknya al-Farabi menganggap bahwa tiga unit pergaulan sosial tersebut tidak merupakan masyarakat-masyarakat yang sempurna, karena tidak cukup lengkap untuk berswasembada dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan para warganya, baik kebutuhan ekonomi, sosial, budaya maupun spiritual.⁴²

Adapun untuk pengaruh iklim atas watak dan perilaku manusia, al-Farabi berpendapat, bahwa manusia tidak sama satu sama lain, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor iklim dan lingkungan tempat mereka hidup, di wilayah yang amat panas, amat dingin, dan sedang, juga faktor makanan. Menurut al-Farabi, faktor-faktor tersebut banyak berpengaruh dalam

⁴² Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara*, 52

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
pembentukan watak, pola pikir, perilaku, orientasi atau kecenderungan dan adat kebiasaan.⁴³

Sedangkan keluarga merupakan masyarakat terkecil dari kehidupan sosial di mana keluarga terdiri dari aspek hubungan antara suami istri, bapak dengan anak-anaknya, mempererat hubungan kekerabatan dan memperinci hak dan kewajiban setiap individu dengan kerabat terdekat.⁴⁴

Sedangkan masyarakat yang tidak sempurna, dapat dikatakan juga masyarakat kecil yang diawali dari keluarga dalam lingkup pergaulan sosial yang sangat kecil di dalam rumah maupun di sekitar lingkungan rumah.

Perkembangan dari tidak sempurna kepada sempurna itu ialah bertingkat-tingkat, mula-mula masyarakat keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat lorong, masyarakat lorong bagian dari masyarakat kampung dan masyarakat kampung merupakan bagian dari masyarakat kota, kemudian menuju kepada sempurna berpemerintahan.⁴⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Dengan demikian, masyarakat yang sempurna dapat dikatakan masyarakat yang bernegara/berpemerintahan, di mana dalam suatu negara terdapat masyarakat dan kepala negara sebagai pemimpin masyarakat. Negara tersebut dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya dalam segala hal. Masyarakat yang demikian dapat dikatakan masyarakat yang ideal.

Masyarakat yang ideal adalah konsep tentang masyarakat yang terbaik dan dicita-citakan oleh negara sehingga dapat memenuhi harapan-harapan dan keinginan anggotanya.

⁴³ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara*, 51.

⁴⁴ Muhammad abu Zahro, *Membangun Masyarakat Islam*, (Bandung, Pustaka Firdaus, 1994), 13.

⁴⁵ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara*, 52.

3. Politik Kenegaraan.

Dalam hal politik kenegaraan al-Farabi menitik beratkan pada pentingnya pemimpin negara utama, oleh karena itu al-Farabi berkesimpulan bahwa baik para Nabi/Rasul maupun para filsuf sama-sama dapat berkomunikasi dengan akal Fa'al, yakni akal kesepuluh (malaikat). Perbedaannya, demikian al-Farabi, komunikasi Nabi/Rasul dengan akal kesepuluh terjadi melalui perantara imajinasi (*al-mutakhayyilah*), yang sangat kuat, sedangkan para filsuf berkomunikasi dengan akal kesepuluh melalui akal *Mustafad*, yaitu akal yang mempunyai kesanggupan dalam menangkap inspirasi dari akal kesepuluh yang ada diluar diri manusia.⁴⁶

Sesuai dengan teorinya bahwa penghuni negara terbagi dalam banyak kelas, al-farabi berpendapat bahwa tidak semua warga negara mampu dan dapat menjadi kepala negara. Yang dapat dan boleh menjadi kepala negar utama hanyalah anggota masyarakat atau manusia yang paling sempurna.⁴⁷

Pemimpin dalam konteks ini adalah seorang yang tidak ada lagi yang berposisi memimpinya, dia adalah seorang imam, pemimpin pada peringkat pertama dalam negara utama. Hal ini merupakan ciri pertama. Kedua, dia adalah pemimpin rakyat yang utama dan pemimpin negara yang makmur. Ketiga, dia harus mempunyai kemampuan berpendapat yang terjaga dari kesalahan menurut syari'ah. Keempat, dia memiliki ide yang cemerlang dan argumentasi yang kuat untuk memprediksi berbagai masalah yang tidak dialami oleh para pendahulu (nenek moyang), kemudian dia mampu mengevaluasi

⁴⁶ *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 332.

⁴⁷ Munawir sjadzali, *Islam Dan Tata Negara*, 55.

kesimpulan-kesimpulannya dalam rangka kebaikan negara. Kelima dia mempunyai kemampuan membimbing dengan rujukan pendapat ulama salaf serta pendapat ulama-ulama berikutnya. Keenam, dia memiliki keberanian untuk ikut serta dalam peperangan, oleh karena itu ia harus memiliki strategi berperang.

Jika tidak ditemukan seorangpun yang memiliki keenam syarat di atas maka harus ada dua orang dalam memimpin negara. Salah satunya adalah seorang filsuf. Sementara yang lain harus memiliki sisa syarat utama yang harus dipenuhi. Dua orang ini adalah bagian yang utama dalam suatu negara. Apabila diperinci dalam satu kelompok maka, filsuf sebagai satu bagian, orang kedua memiliki syarat pertama dan ketiga, atau syarat pertama dan keempat, atau syarat kelima atau syarat keenam. Bagian-bagian tersebut merupakan bagian yang utama.

Apabila pada suatu waktu seorang filsuf tidak ditemukan sementara bagian yang lain yang disyaratkan ada maka negara seolah tanpa raja atau

pemimpin. Pemimpinnya akan memerintah untuk kesesatan, kekejian, karena dia cuma memberi separoh dari hak yang mesti diterima oleh warga. Pemimpin yang bersangkutan akan mendorong dan menghalalkan kedholiman dan kekejian terhadap semua hal yang dikiranya baik.⁴⁸

Dengan demikian politik kenegaraan al-Farabi lebih menitik beratkan pada obyek sesuai dengan idealismenya, dalam hal ini kepala negara yang menjadi penentu dalam suatu negara, bukan di dasarkan pada sistem pemerintahan. Maka dari itu al-Farabi berpendapat bahwa Nabi/rasul dan filosof

⁴⁸ Al-Farabi, *Ara' u Ahli 'l-Madinah*, 79.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
adalah dua pribadi yang paling tepat dalam memimpin suatu negara, karena secara otomatis bila kepala negara itu berjiwa Nabi/Rasul atau filosof akan menjadi arif dan bijaksana, yang pada gilirannya akan mampu mendidik dan menarik rakyat ke jalan yang benar, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Al-Farabi ingin menggambarkan pula pentingnya bagi kepala negara untuk membersihkan jiwanya dari berbagai aktifitas hewani, seperti korupsi, manipulasi, tirani yang merupakan aktualitas pemerintahan jahiliyah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

ANALISA

Dalam sebuah penelitian komperatif, hal umum yang biasa di lakukan oleh kebanyakan peneliti adalah meneliti tentang persamaan dan perbedaan suatu konsep yang di kaji. Begitu juga dalam studi komperatif ini, penulis mencoba menganalisa tentang persamaan dan perbedaan yang terjadi antara pemikiran politik Plato al-Farabi, serta menganalisa latar belakang terjadinya persamaan pemikiran antara keduanya.

A. Persamaan Pemikiran Politik Plato Dan Al-Farabi

Persamaan pemikiran politik Plato dan al-Farabi didasari adanya persamaan latar belakang. Persamaan tersebut adalah, Plato dan al-Farabi sama-sama hidup dalam kekacauan pemerintahan. Plato di lahirkan dan tumbuh dewasa pada saat perang Peloponesos sedang berkobar, Plato menyaksikan kekalahan Athena dalam perang Peloponesos. Sedangkan al-Farabi hidup pada zaman kekuasaan Abbasyiah di guncang oleh berbagai gejolak, pertentangan dan pemberontakan. dan di samping itu baik Plato maupun al-Farabi tidak pernah menduduki salah satu jabatan pemerintahan, hal itu di satu pihak merupakan keuntungan, tetapi di lain pihak merupakan kerugian. Merupakan keuntungan oleh karena mereka mempunyai kebebasan dalam berfikir tanpa harus berusaha menyesuaikan gagasannya dengan pola politik yang ada. Merupakan kerugian oleh karena mereka tidak mempunyai peluang untuk belajar dari pengalaman dalam pengelolaan urusan kenegaraan, dan juga untuk menguji kebenaran teorinya dengan kenyataan-kenyataan politik yang terjadi di tengah kehidupan

bernegara pada zamannya. Berangkat dari latar belakang kedua tokoh tersebut adanya beberapa persamaan pemikiran politik antara Plato dan al-Farabi. Bahkan boleh jadi situasi yang hampir sama sekalipun tidak persis menimbulkan pemikiran politik al-Farabi di pengaruhi oleh Plato. Hal ini dibuktikan dengan adanya persamaan-persamaan dalam pemikiran al-Farabi dengan pemikiran Plato.

1. Adapun persamaan pertama adalah, persamaan dalam hal negara utama, yaitu Plato dan al-Farabi dalam memberikan konsep politik ingin mewujudkan suatu negara ideal. Negara ideal itu adalah negara yang bertujuan untuk kebahagiaan dan kemakmuran rakyatnya, baik Plato maupun al-Farabi sama-sama meletakkan kepentingan bersama yaitu kepentingan rakyat, keduanya sama-sama mengharapkan adanya keselarasan dan keteraturan di dalam negara ideal.
2. Persamaan kedua, dan hal masyarakat, Plato dan al-Farabi berpendapat, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, dengan kata lain manusia itu tidak dapat hidup sendiri-sendiri mereka selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Plato maupun al-Farabi sama-sama membagi masyarakat dalam dua golongan. yaitu masyarakat yang sempurna dan masyarakat yang tidak sempurna. Di dalam masyarakat yang sempurna keduanya sepakat bahwa negara-kota merupakan sistem atau pola politik yang terbaik dan terunggul. Beberapa pengamat sejarah ilmu politik Islam menganggap aneh pendapat al-Farabi itu, oleh karena pada waktu itu dia hidup pada zaman dikala Islam telah terbagi-bagi menjadi semacam negara-negara nasional, yang masing-masing terdiri dari banyak kota dan desa serta berwilayah luas. Dalam pada itu

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 pendapat al-Farabi ini dapat dianggap sebagai bukti bahwa dalam idealisasi pola politik dia tidak menghiraukan kenyataan-kenyataan politik pada zaman dia hidup.¹ Dalam hal pembagian kelas dalam masyarakat. Mereka berpendapat bahwa ada tiga kelas atau golongan, yaitu golongan tertinggi dari para yang memerintah, golongan pembantu, yaitu para prajurit, dan golongan terendah, yang terdiri dari rakyat biasa. Dalam hal ini al-Farabi bukannya mengadakan kasta dalam warga manusia, karena bagaimanapun juga Islam mengajarkan prinsip persamaan.

3. Persaman ketiga, tentang Kepala Negara, keduanya berpendapat bahwa orang yang pas untuk memimpin suatu negara adalah seorang filosof. Karena filosof itu mempunyai pengetahuan yang lebih baik jika di bandingkan dengan yang lain, di samping itu seorang filosof dapat memimpin masyarakat dengan berorientasi pada ide metafisika tertinggi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id B. Perbedaan Pemikiran Politik Plato Dan Al-Farabi

Perbedaan pemikiran politik Plato dan al-Farabi juga dilatarbelaki oleh kekacaun pemerintahan. Tapi perbedaannya adalah; Jika Plato kekacaun yang timbul dikarenakan ketidak mampuan sistem pemerintahan yang diterapkan. Sedangkan jika al-Farabi kekacaun itu timbul karena adanya perebutan kekuasaan dan semua golongan menginginkan menjadi kepala negara.

1. Perbedaan pemikiran politik Plato yaitu, dalam pandangannya tentang negara utama. Plato mengemukakan bahwa adanya analogi antara jiwa dan negara. Apa hakikat jiwa itu, begitulah hakikat negara. Unsur yang dijumpai pada jiwa, di

¹ Munawir sjadzali, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta : UI-Press, 1993), 52.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 jumpai pula pada negara. Hal ini di dasari oleh Plato tentang tiga fungsi jiwa.

Bagian pertama ialah “bagian rasional” (*to logistikom*). Bagian kedua ialah “bagian keberanian” (*to thymoeides*). Dan bagian ketiga ialah “bagian keinginan” (*to epithymetikom*). “bagian keberanian” dapat dibandingkan dengan yang kita maksud dan dengan kehendak, sedangkan “bagian keinginan” menunjukkan hawa nafsu. Plato menghubungkan ketiga bagian jiwa masing-masing dengan salah satu keutamaan tertentu. “Bagian keinginan” mempunyai pengendalian diri (*sophrosyne*) sebagai keutamaan khusus. Untuk “bagian keberanian” keutamaan yang spesifik adalah kegagahan (*andheria*). Dan “bagian rasional” dikaitkan dengan keutamaan kebijaksanaan (*phronesis* atau *sophia*). Di samping itu ada lagi keadilan (*dikalosyne*) yang tugasnya ialah menjamin keseimbangan antara ketiga bagian jiwa.² Sedangkan al-Farabi mempunyai pandangan bahwa suatu negara utama adalah negara yang harus berpedoman pada contoh teraturnya hubungan Tuhan dengan alam semesta dan antara isi alam satu dengan yang lain. Bagi al-Farabi negeri yang utama itu menyerupai badan yang sempurna dan sehat di mana anggota badannya saling bekerja sama dengan sempurna. Hal ini berhubungan dengan posisi yang ada dalam negara utama, seperti halnya anggota badan.

2. Dalam hal kepala, negara Plato maupun al-Farabi sama berpendapat bahwa orang yang pas untuk mengepalai suatu negara adalah seorang filosof, tapi yang membedakan pemikiran keduanya adalah, jika Plato hanya mementingkan pendidikan seseorang yang memerintah, misalnya seorang yang memerintah memerlukan pendidikan yang melebihi dari yang lain. Mereka harus mulai mempelajari kesenian, persajakan dan musik, dan lain-lainnya. Tapi al-Farabi

² K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, (Yogyakarta : Kanisius, 1999), 139.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
lebih detil lagi tentang persyaratan seseorang untuk menjadi kepala negara. Dan seorang kepala negara harus memiliki dua belas karakter yang merupakan wataknya. Dalam pemikiran al-Farabi, bahwa filosof, kepala negara, raja, adalah pembuat undang-undang dan imam adalah sama pengertiannya. Agar seseorang dapat mencapai martabat ini, disyaratkan kemampuannya mencapai tingkat "akal mustafad", sehingga ia dapat berhubungan dengan akal aktif (*'aql munfa'il*), yakni akal kesepuluh yang juga disebut Jibril. Lewat akal ini, Allah menyampaikan wahyu-Nya kepada orang tersebut. Artinya, akal aktif meneruskan wahyu itu kepada akal pasif (*'aql munfa'il*) melalui akal mustafad dan selanjtnya kepada daya akal khayal (*quwwah mutakhayyilah*). Wahyu yang melimpah kepada akal pasif, maka orangnya disebut failasuf, sedangkan yang melimpah kepada daya khayal, ia disebut Nabi.

Menurut pendapat al-Farabi antara Nabi dan filosof tidak ada perbedaan dalam hal kebenaran. Nabi dan filosof adalah dua tokoh yang sangat layak menjadi Kepala Negara Utama, karena keduanya telah mampu berhubungan dengan akal aktif yang merupakan sumber hukum dan aturan yang diperlukan bagi kehidupan masyarakat. Kalaulah ada perbedaan, maka itu terletak hanya pada cara berhubungan dengan akal aktif yang oleh Nabi melalui daya khayal, sedangkan oleh filosof dengan pemikiran akal. Adapun tentang sumber dan materi yang mereka terima adalah tidak berbeda, dan karena itu Nabi dan filosof membawa kebenaran yang sama. Namun demikian filosof tidak sejajar tingkatannya dengan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Nabi karena setiap Nabi adalah filosof dan tidak setiap filosof itu nabi. Setiap nabi memiliki keistimewaan yang melebihi filosof.³

Pemikiran tentang Kepala Negara menurut Plato, pada awalnya Plato juga setuju bahwa yang berhak menjadi kepala negara adalah seorang filosof, tetapi hal ini berubah dalam suatu dialognya yang berjudul *Politikos*, Plato menyatakan bahwa negara yang berdasarkan pengetahuan satu orang (filosuf) yang membuat undang-undang untuk setiap kesempatan konkret dianggap tidak mungkin. Dalam hal kenegaraan, Plato lebih menitik beratkan pada sistem pemerintahan. Hal ini berbeda dengan al-Farabi yang tidak menganggap pentingnya suatu sistem kenegaraan, tapi al-Farabi lebih menitik beratkan pada Kepala negara.

Sebenarnya kita juga bisa melihat keseluruhan pemikiran Plato ini yang mengarah pada pentingnya sistem kenegaraan. Hal ini disebabkan Plato lahir ketika puncak kejayaan pemerintahan demokratis Athena yang berada di bawah pimpinan Pericles baru saja berlalu. Ia dilahirkan dan tumbuh menjadi dewasa apada saat perang Peloponesos sedang berkobar. Ia menyaksikan kekalahan Athena dalam perang Peloponesos itu pada 404 SM. Bagi Plato, kekalahan Athena itu merupakan akibat dari ketidakmampuan sistem pemerintahan demokratis untuk memenuhi kebutuhan rakyat di bidang politik, moral, dan spiritual. Itulah yang menyebabkan Plato begitu kritis terhadap demokrasi.

Jadi pemikiran politik Plato itu muncul karena dia berasal dari keluarga aristokrasi, tapi Plato kecewa dengan sistem pemerintahan yang diterapkan di negaranya. Walaupun Plato berasal dari keluarga aristokrasi, tapi pemikiran politik

³ Ahmad Daudy, *Kuliah Filsafat Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1986), 54.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Plato murni dari pemikiran filsafat, oleh karena itu pemikiran politik Plato sangat berguna bagi semua orang.

Kita kembali pada al-Farabi yang juga mengalami kekacauan pemerintahan, pada masa dia tumbuh dewasa. Tetapi kekacauan pemerintahan pada masa al-Farabi adalah berebutan wilayah dan kekayaan nenek moyangnya, dan semua golongan merasa lebih berhak untuk memimpin dunia Islam. Mungkin karena situasi politik yang demikian maka al-Farabi merasa terpenggil untuk mencari pola kehidupan bernegara dan bentuk pemerintahan yang ideal.

Jadi latar belakang terjadinya persamaan pemikiran politik antara Plato dan al-Farabi dilatarbelakangi oleh kekacauan sistem pemerintahan dan pola kehidupan bernegara. Dan perjalanan pada masa hidupnya, baik Plato maupun al-Farabi tidak banyak perbedaan, karena keduanya sama-sama hidup dalam keadaan yang sangat sederhana. Hal ini dapat digambarkan, bahwa Plato lebih senang hidup sendiri, karena selama hidupnya Plato tidak pernah kawin dan tidak punya anak. Sedangkan al-Farabi hidup dalam kesederhanaannya (zuhud) yang hanya mencukupi empat dirham untuk kehidupan sehari-harinya.

Demikianlah analisa yang dapat penulis uraikan, yang pada intinya konsep politik untuk mewujudkan suatu negara yang ideal itu adalah adanya keselarasan dalam pemerintahan. Dan mengupayakan kebahagiaan dan kemakmuran rakyatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Sesuai dengan uraian pada bab-bab yang terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Negara ideal dalam pemikiran politik Plato adalah suatu negara yang bertujuan untuk kebahagiaan dan kemakmuran rakyatnya. Hal ini dapat tercapai apabila tercipta keselarasan antara semua keahlian, di dalam kelas-kelas dalam negara utama. Maka untuk mencapai suatu negara yang ideal diharapkan anggota masing-masing kelas mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan tanpa mencampuri tugas kelas-kelas yang lain. Sedangkan negara ideal dalam pemikiran politik al-Farabi adalah: Sebagaimana pemikiran politik Plato, negara ideal adalah negara yang bertujuan untuk kebahagiaan dan kemakmuran rakyatnya. Dan hal ini bisa tercapai juga dengan adanya keselarasan antara semua keahlian. Tapi al-Farabi memasukkan unsur agama, yaitu jika ingin mencapai kemakmuran dan kebahagiaan dalam negara maka warga negaranya harus berpedoman pada contoh teraturnya hubungan Tuhan dengan alam dan antara isi alam satu dengan yang lain. Hubungan alam dengan Tuhan itu dapat menjadi teladan antara masyarakat dengan kepala negaranya.
2. Persamaan kedua adalah: Dalam hal pembagian masyarakat dalam negara utama, Plato dan al-Farabi sama-sama membagi masyarakat menjadi dua yaitu: masyarakat yang sempurna dan masyarakat yang tidak sempurna.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Dan keduanya sepakat bahwa masyarakat yang sempurna adalah masyarakat negara kota.

3. Adapun persamaan kedua pemikiran ini yaitu, sama-sama menginginkan seorang filosof yang menjadi kepala negara. Sedangkan perbedaannya, jika Plato pada awalnya berpendapat bahwa orang yang tepat untuk menjadi kepala negara adalah seorang filosof. Tapi pada akhirnya Plato berubah pendapat bahwa pengetahuan satu orang filosof yang membuat undang-undang untuk setiap keadaan yang konkrit dianggap tidak mungkin. Maka dengan demikian pemikiran politik Plato lebih menitik beratkan pada sistem pemerintahan dan undang-undang yang tepat untuk suatu negara. Sedangkan al-Farabi tetap berpendapat bahwa orang yang tepat untuk menjadi kepala negara adalah seorang filosof/Rasul. Dan pemikiran kenegaraannya tidak terlalu menekankan pada sistem pemerintahan suatu negara.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
4. terjadinya persamaan dalam pemikiran politik Plato dan al-Farabi disebabkan karena keduanya sama-sama lahir dan tumbuh dewasa dalam keadaan pemerintahan yang kacau. Maka berangkat dari sinilah keduanya mempunyai pemikiran politik yang bertujuan untuk mewujudkan suatu negara yang ideal yang dapat mewujudkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat, serta dapat menjamin keamanan hidup rakyatnya.

B. Saran-saran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Setelah penulis menelaah dan memahami isi permasalahan politik dan

negara, tidaklah berlebihan jika penulis dapat menyarankan, bahwa :

1. Kita sebagai rakyat, seharusnya dapat menjalankan tugas kita sebagai rakyat. Janganlah kita menuntut hak kita sebelum kita melaksanakan kewajiban kita. Di samping itu dalam kehidupan sehari-hari kaum muslim harus selalu berpedoman kepada ajaran-ajaran agama, karena ia merupakan pelita penerang kegelapan dan pemberi petunjuk serta sebagai pegangan dan pedoman dalam menempuh kehidupan ini, Agama jangan dijadikan sebagai penghias saja, akan tetapi harus dipraktekkan dan dilaksanakan secara keseluruhan.
2. Dalam menjalankan roda pemerintahan, para pemimpin juga haruslah melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab. Para politikus hendaknya dapat mengontrol roda pemerintahan dengan benar agar tidak merugikan orang lain, baik yang bersifat individu maupun kelompok. Dengan demikian tidak akan terjadi seperti yang menimpa bangsa indonesia pada saat ini, akibat ulah para pemimpin dan para politikusnya, yang tidak bertanggungjawab dalam menjalankan roda pemerintahan.
3. Para pejabat hendaknya janganlah menjadikan jabatannya sebagai kedok untuk kepentingan dirinya dan para kroninya sendiri. Di samping itu hendaklah agama jangan hanya dijadikan pemoles luar saja akan tetapi harus dipatuhi dan dipraktekkan dalam kehidupan nyata, dalam berpolitikpun haruslah demikian, sehingga kemakmuran dan kebahagiaan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
serta keadilan dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat, dan bukan
hanya kalangan atas saja.

C. Penutup.

Demikianlah uraian kami dalam rangka penulisan skripsi sebagai tugas yang dibebankan kepada setiap mahasiswa di IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang merupakan salah satu syarat untuk melengkapi ujian teoritis guna mendapatkan gelar kesarjanaan dalam ilmu Ushuluddin.

Kami yakin bahwa apa yang kami kemukakan dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena kedangkalan dan keterbatasan yang kami miliki. Oleh karena itu jika terdapat kekeliruan dan kesalahan terutama di dalam usaha kami mengetahui lebih jelas pemikiran politik Plato dan al-Farabi dalam mewujudkan negara ideal, tidaklah lupa kami mengharapkan kepada para pembaca agar sudi meluruskan serta membetulkan kesalah-kesalahan kami. Di samping itu kajian ulang terhadap tema skripsi ini secara lebih kritis dan sistematis sangat dianjurkan.

Selanjutnya kami berharap dan berdo'a semoga skripsi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi diri kami dan juga para pembaca, amin.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Farabi, *Ara' u Ahli 'l-Madinah al-Fadilah*, Kairo, Muhammad Ali Shubaih

Ahmad Fuad al-Ahwani, *Filsafat Islam*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1997.

A. Mustofa, *Filsafat Islam*, Bandung, CV Pustaka Setia, 1997.

Asmoro Ahmadi, *Filsafat Umum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Ahmad Syadzali, Mudzakir, *Filsafat Umum*, Bandung, Pustaka Setia, 1997.

Ahmad Daudy, *Kuliah Filsafat Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1986.

Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1990.

Cappy Haricahyono, *Ilmu Politik Dan Perspektifnya*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1991.

Carlton Clymar Rodee Dkk, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta, Rajawali Pers, 1993.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.

Delia Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Bandung, Mizam, 1997.

Ensiklopedi Islam, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Haeve.

Endang Saifudin Anshari, *Wawasan Islam Pokok-pokok Fikiran Tentang Islam Dan Umatnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993.

Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,

Harun Nasution, *Filsafat Dan Mistisme Dalam Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1999.

Hasymyiah Nasution, *Filsafat Islam*, Gaya Media Pratama, 1999.

Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, Jakarta, UI-Perss, 1979.

Horald H. Titus Dkk, *Persoalan - persoalan Filsafat*, Terjemah H.M. Rosyidi, Jakarta, Bulan Bintang, 1984.

Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat I*, Yogyakarta, Kanisius, 1991.

Iswara. F, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung Bina Ilmu, 1980.

J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996.

K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta, Kanisius, 1999.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Muhammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, Jakarta, UI-Perss, 1986.

Muhammad Azar, *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam dan Barat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 1997.

Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara*, Jakarta, UI-Perss, 1993.

Muhammad Abu Zahro, *Membangun Masyarakat Islam*, Bandung, Pustaka Firdaus, 1994.

M. Syarif, *Para Filosof Muslim*, Bandung, PT Mizam, 1994.

Poerwantana, A. Ahmadi dan M.A. Rosali, *Seluk Beluk Filsafat Islam*,

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993.

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Pt Gramedia Sarana
Indonesia, 1992.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta, Raja Grafindo persada, 1997.

Translate by Benjamin Jowett, *The Dialogues of Plato*, Chicago Oxford
Universiti Perss, 1986.

Wahyu, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya, Usaha nasional, 1986.

Yunasril Ali, *Perkembangan Pemikiran Falsafi Dalam Islam*, Jakarta,
Bumi Aksara, 1991.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id